



**LAPORAN KINERJA
DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
2022**



**PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
DINAS KETAHANAN PANGAN
JALAN KAMBOJA NO.15 KANDANGAN 71213**

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga tugas penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2022 dapat diselesaikan. Penyusunan laporan ini merupakan upaya kami untuk menginformasikan pertanggungjawaban kinerja yang telah dilakukan organisasi perangkat daerah selama tahun 2022, sebagai konsistensi kami terhadap komitmen untuk menciptakan transparansi yang merupakan pilar terwujudnya tata pemerintahan yang baik. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 memuat informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2022 sesuai yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2022.

Hasil pencapaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2022 tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras semua pihak yakni masyarakat, swasta dan aparat pemerintah daerah baik dalam perumusan kebijakan, maupun dalam implementasi serta pengawasannya. Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan LAKIP Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2022.

Kandangan, Desember 2022
Kepala Dinas Ketahanan Pangan,



Ir. H. AKHMAD MAWARDI

Pembina Utama Muda

NIP. 19601219 198503 2 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI.....	2
DAFTAR TABEL	3
DAFTAR GAMBAR	4
DAFTAR GRAFIK	5
BAB I PENDAHULUAN	6
A. LATAR BELAKANG	7
B. TUGAS DAN FUNGSI	8
C. STRUKTUR ORGANISASI	17
D. PERAN STRATEGIS ORGANISASI	19
E. SISTEMATIKA PELAPORAN	21
BAB II PERENCANAAN KINERJA	22
A. RENCANA STRATEGIS	22
B. RENCANA KERJA DAN ANGGARAN DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN	25
C. PERJANJIAN KINERJA	28
D. INDIKATOR KERJA UTAMA (IKU)	28
E. PENGUKURAN KINERJA ATAS PERJANJIAN KINERJA	30
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	32
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	32
B. REALISASI ANGGARAN	63
BAB IV PENUTUPAN	66
LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara revidi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah Dokumen yang berisi gambaran, perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang disusun dan disampaikan secara sistematis dan melembaga sedangkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat AKIP adalah perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2022 pada dasarnya dilatarbelakangi oleh tekad dan kesungguhan untuk melaksanakan tugas yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan yang ada maupun dokumen perencanaan pembangunan daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) serta ikut memenuhi tuntutan visi, misi dan agenda pembangunan. Ketahanan pangan mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembangunan bangsa karena pemenuhan pangan merupakan hak asasi setiap manusia. Selain itu, ketahanan pangan juga merupakan salah

satu pilar ketahanan nasional suatu bangsa dan menunjukkan eksistensi kedaulatan bangsa. Terkait dengan hal tersebut, ketahanan pangan tidak akan dapat terwujud dengan hanya melibatkan satu komponen, tapi harus melibatkan seluruh komponen bangsa baik pemerintah maupun masyarakat, harus bersama-sama membangun ketahanan pangan secara sinergi. Hal inilah yang kemudian dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, yang merumuskan ketahanan pangan sebagai *“kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, halal, merata dan terjangkau”* dan ketahanan pangan merupakan *tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat*. Undang-undang tentang Pangan tersebut kemudian dijabarkan dalam berbagai Peraturan Pemerintah untuk diimplementasikan dalam keputusan Pimpinan Pemerintah.

Dalam rangka mencapai ketahanan pangan yang mantap dan berkesinambungan, ada 3 (tiga) komponen pokok yang harus diperhatikan: (1) Ketersediaan pangan yang cukup dan merata; (2) Keterjangkauan pangan yang efektif dan efisien; serta (3) Konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, aman dan halal. Ketiga komponen tersebut perlu diwujudkan sampai tingkat rumah tangga dengan: (1) Memanfaatkan potensi sumberdaya lokal yang beragam untuk peningkatan ketersediaan pangan dengan teknologi spesifik lokasi dan ramah lingkungan; (2) Mendorong masyarakat untuk mau dan mampu mengkonsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman untuk kesehatan; (3) Mengembangkan perdagangan pangan regional dan antar daerah, sehingga menjamin pasokan pangan ke seluruh wilayah dan terjangkau oleh masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI); (4) Memanfaatkan pasar pangan Internasional secara bijaksana bagi pemenuhan konsumen yang beragam serta (5) Memberikan jaminan bagi masyarakat miskin di perkotaan dan perdesaan dalam mengakses pangan yang bersifat pokok.

Upaya untuk mewujudkan pemantapan ketahanan pangan tersebut, kemudian dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan pembangunan ketahanan pangan yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan. Guna mengetahui kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan ketahanan pangan tersebut selama tahun 2022, disusunlah Laporan Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2022.

B. TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan No 71 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah. Tugas pokok Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah membantu bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang penyelenggaraan pangan berdasarkan kedaulatan dan kemandirian, penyelenggaraan pangan, penanganan kerawanan pangan dan keamanan pangan serta tugas lain yang diberikan Bupati sesuai perundang-undangan yang berlaku. Untuk melaksanakan tugas Dinas Ketahanan Pangan mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Penetapan rencana strategis, program dan anggaran Dinas Ketahanan Pangan;
2. Perumusan kebijakan bidang penyelenggaraan pangan berdasarkan kedaulatan dan kemandirian, penyelenggaraan pangan, penanganan kerawanan pangan dan keamanan pangan;
3. Pelaksanaan kebijakan bidang penyelenggaraan pangan berdasarkan kedaulatan dan kemandirian, penyelenggaraan pangan, penanganan kerawanan pangan dan keamanan pangan;
4. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang penyelenggaraan pangan berdasarkan kedaulatan dan kemandirian, penyelenggaraan pangan, penanganan kerawanan pangan dan keamanan pangan;
5. pelaksanaan administrasi Dinas Ketahanan Pangan; dan
6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sesuai peraturan Bupati tersebut Dalam pelaksanaan tugasnya Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan di bantu oleh 1 (satu) Sekretaris dan 2 (dua) Kepala Bidang.

Secara rinci tugas dan fungsi setiap bagian di Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai berikut:

1. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan pelayanan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan serta tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. Fungsi Sekretariat sebagai berikut :

- a. koordinasi penyusunan rencana strategis, program, dan anggaran Dinas Ketahanan Pangan;
- b. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, kerumah tanggaan, kerjasama, hukum, hubungan masyarakat, keprotokolan, arsip, dan dokumentasi;
- c. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- d. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- e. pengelolaan barang milik/kekayaan negara;
- f. pelaksanaan koordinasi program dan kegiatan di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan ;
- g. koordinasi penyusunan laporan kinerja, program dan kegiatan;
- h. pembinaan dan pemberian dukungan urusan administrasi keuangan, perbendaharaan, akuntansi dan verifikasi; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri dari :

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan surat menyurat, kearsipan, inventarisasi barang, rumah tangga, perlengkapan, perjalanan dinas, kerjasama, hukum, hubungan masyarakat, keprotokolan, arsip, dan dokumentasi serta pengelolaan administrasi kepegawaian dan ketatalaksanaan. dengan rincian berikut :

- a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. melaksanakan urusan tata usaha dan kearsipan;
- c. menyiapkan bahan dan menyusun Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Tahunan Barang Unit (RTBU) sesuai usulan masing-masing Bidang;
- d. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengadaan, penyaluran, penghapusan dan pemindahtanganan barang;
- e. melakukan penyiapan bahan penatausahaan dan inventarisasi barang;

- f. melaksanakan pelayanan administrasi perjalanan dinas, pelayanan akomodasi tamu, hubungan masyarakat dan keprotokolan;
- g. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan lingkungan kantor;
- h. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan dan pengembangan pegawai;
- i. menyiapkan bahan dan melaksanakan proses administrasi kepegawaian meliputi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pemberhentian, mutasi, pensiun dan cuti;
- j. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan pegawai meliputi pembinaan disiplin, pengawasan melekat, kesejahteraan, pemberian tanda jasa/penghargaan dan kedudukan hukum pegawai;
- k. menyiapkan bahan, telaahan dan melaksanakan penyusunan peraturan perundang-undangan serta evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- l. menyiapkan bahan dan mengelola tata usaha kepegawaian meliputi DUK, dokumentasi berkas kepegawaian dan rekapitulasi absensi;
- m. menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai bidang tugas.

b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan urusan penyusunan program, rencana kerja, rencana anggaran dan pelaporan pelaksanaan kegiatan, pengelolaan administrasi keuangan dan pertanggungjawaban keuangan, serta laporan keuangan, dengan rincian berikut :

- a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- b. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program Dinas Ketahanan Pangan;
- c. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan anggaran Dinas Ketahanan Pangan;

- d. menyiapkan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan, dan perubahan anggaran;
- e. melakukan kerjasama dengan unit kerja dan instansi terkait dalam rangka penyusunan rencana kerja, baik rencana kerja tahunan, jangka menengah maupun jangka panjang;
- f. menyusun rencana anggaran belanja tidak langsung, anggaran belanja langsung, rencana penerimaan dan pendapatan Dinas Ketahanan Pangan;
- g. melaksanakan koordinasi dan kerjasama penyusunan rencana anggaran belanja dan rencana pendapatan dan penerimaan;
- h. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi penyusunan rencana evaluasi dan pelaporan kinerja;
- i. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyajian dan analisa data yang berhubungan dengan bidang pangan;
- j. menyiapkan bahan dan menyusun konsep laporan kegiatan Dinas, baik laporan rutin maupun laporan insidental;
- k. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis dan melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan, akuntansi, dan verifikasi keuangan;
- l. melaksanakan urusan perbendaharaan, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, pengujian dan penerbitan surat perintah membayar;
- m. melaksanakan urusan gaji pegawai;
- n. menyiapkan bahan pengesahan dokumen anggaran;
- o. menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi realisasi anggaran;
- p. menyiapkan bahan dan menyusun laporan pertanggung jawaban keuangan dan pengelolaan dokumen keuangan ;
- q. menyiapkan bahan dan mengusulkan pejabat pengelola perbendaharaan;
- r. menyiapkan bahan pemantauan tidak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi;
- s. menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
- t. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai bidang tugas.

2. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan

Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pengkajian sistem ketersediaan, cadangan pangan daerah, pengamanan dan pengendalian harga pangan strategis, pemetaan kerawanan pangan, sistem distribusi pangan dan kewaspadan pangan. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan teknis sistem ketersediaan pangan, cadangan pangan daerah, pengamanan dan pengendalian harga pangan strategis, pemetaan kerawanan pangan, sistem distribusi pangan dan kewaspadan pangan;
- b. penyusunan program sistem ketersediaan pangan, cadangan pangan daerah, pengamanan dan pengendalian harga pangan strategis, pemetaan kerawanan pangan, sistem distribusi pangan dan kewaspadan pangan;
- c. pelaksanaan sistem ketersediaan pangan, cadangan pangan daerah, pengamanan dan pengendalian harga pangan strategis, pemetaan kerawanan pangan, sistem distribusi pangan dan kewaspadan pangan;
- d. pelaksanaan koordinasi kebijakan sistem ketersediaan pangan, cadangan pangan daerah, pengamanan dan pengendalian harga pangan strategis, pemetaan kerawanan pangan, sistem distribusi pangan dan kewaspadan pangan;
- e. pembinaan, pengawasan dan pengendalian sistem ketersediaan pangan, cadangan pangan daerah, pengamanan dan pengendalian harga pangan strategis, pemetaan kerawanan pangan, sistem distribusi pangan dan kewaspadan pangan;
- f. evaluasi dan pelaporan sistem ketersediaan pangan, cadangan pangan daerah, pengamanan dan pengendalian harga pangan strategis, pemetaan kerawanan pangan, sistem distribusi pangan dan kewaspadan pangan; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya

Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan mempunyai 2 sub koordinator yang terdiri dari :

a. Subkoordinator Ketersediaan Pangan dan Kerawanan Pangan

Subkoordinator Ketersediaan dan Kerawanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan melaksanakan analisis, penyusunan rencana program kerja, pemantauan, evaluasi, supervisi, pengkajian kebijakan teknis ketersediaan dan kerawanan pangan, pendampingan. Dengan rincian sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kegiatan subkoordinator Ketersediaan dan Kerawanan Pangan;
- b. menyiapkan bahan koordinasi dan analisis dibidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya ketahanan pangan lainnya;
- c. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan bahan pendampingan dan pelaksanaan kegiatan dibidang ketersediaan pangan;
- d. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan, evaluasi, supervisi, dan pelaporan kegiatan;
- e. menyiapkan data, dan informasi untuk penyusunan Neraca Bahan Makanan dan perhitungan Pola Pangan Harapan (PPH);
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengembangan jaringan informasi ketersediaan pangan dan pengkajian penyediaan infrastuktur pangan;
- g. menyiapkan bahan koordinasi, analisis, bahan pendampingan dan penyusunan rencana kegiatan dibidang cadangan pangan dan penanganan kerawanan pangan;
- h. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang cadangan pangan dan penanganan kerawanan pangan;
- i. menyiapkan bahan dan melaksanakan bahan intervensi penanganan daerah rawan pangan;
- j. menyusun data analisis sistem kewaspadaan pangan dan gizi;
- k. mengunpulkan dan mengolah data dan informasi kerentanan dan ketahanan pangan Daerah;
- l. menyiapkan penyediaan dan pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Daerah (pangan pokok dan pangan pokok lokal); dan

m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan sesuai bidang tugas;

b. Subkoordinator Distribusi Pangan

Subkoordinator Distribusi Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan melaksanakan analisis, pendampingan, penyusunan rencana, pemantauan, evaluasi distribusi pangan. Dengan rincian sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kegiatan subkoordinator Distribusi Pangan;
- b. menyiapkan bahan koordinasi kegiatan pendampingan dan penyusunan rencana kegiatan dibidang distribusi dan harga pangan;
- c. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang distribusi harga pangan;
- d. mengumpulkan dan mengolah data dan informasi rantai pasok dan jaringan distribusi pangan;
- e. melaksanakan pengembangan kelembagaan distribusi pangan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan;
- f. melaksanakan penyusunan prognosa neraca pangan;
- g. mengumpulkan dan mengolah data harga pangan di tingkat produsen dan konsumen untuk panel harga;
- h. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis / operasional pembinaan lembaga tunda jual, lumbung pangan dan Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (LUEP) sesuai prosedur yang berlaku;
- i. mengelola dana cadangan pangan daerah dalam rangka persediaan dan pengendalian harga pangan; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan sesuai bidang tugas.

3. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan

Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, pembinaan, pemantauan dan evaluasi sistem konsumsi, keamanan pangan, penganeekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal terhadap konsumsi serta keamanan pangan. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan teknis sistem konsumsi, keamanan pangan, penganeekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal terhadap konsumsi serta keamanan pangan;
- b. penyusunan program sistem konsumsi, keamanan pangan, penganeekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal terhadap konsumsi serta keamanan pangan;
- c. pelaksanaan sistem konsumsi, keamanan pangan, penganeekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal terhadap konsumsi serta keamanan pangan;
- d. pelaksanaan koordinasi sistem konsumsi, keamanan pangan, penganeekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal terhadap konsumsi serta keamanan pangan;
- e. pembinaan, pengawasan dan pengendalian sistem konsumsi, keamanan pangan, penganeekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal terhadap konsumsi serta keamanan pangan;
- f. evaluasi dan pelaporan program sistem konsumsi, keamanan pangan, pengembangan pangan lokal dan evaluasi terhadap konsumsi dan keamanan pangan; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai 2 subkoordinator yang terdiri dari :

- a. Subkoordinator Konsumsi dan Penganeekaragaman Pangan

Subkoordinator Konsumsi dan Penganeekaragaman Pangan mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi, pengkajian, dan penyusunan kebijakan, pemantapan, pendampingan, pemantauan, dan pengolahan data statistik konsumsi pangan, keanekaragaman pangan, pola pangan harapan, dan neraca bahan makanan serta evaluasi konsumsi dan penganeekaragaman pangan. Dengan rincian sebagai berikut :

1. menyusun rencana kegiatan subkoordinator Distribusi Pangan;
2. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan rencana dan bahan pendampingan di bidang konsumsi pangan;
3. menyiapkan bahan pemantauan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang konsumsi pangan;

4. melaksanakan perhitungan tingkat konsumsi energi dan protein masyarakat per kapita per tahun;
5. melaksanakan perhitungan pola pangan harapan (PPH) tingkat konsumsi;
6. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan peta pola konsumsi pangan;
7. menyiapkan bahan koordinasi dan analisis penyusunan rencana dan bahan pendampingan di bidang konsumsi pangan, promosi penganeekaragaman pangan, dan pengembangan pangan lokal;
8. menyiapkan bahan pemantauan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang konsumsi pangan, promosi penganeekaragaman konsumsi pangan, dan pengembangan pangan lokal;
9. melaksanakan promosi konsumsi pangan yang beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) berbasis sumber daya lokal;
10. melaksanakan gerakan konsumsi pangan non beras dan non terigu;
11. melaksanakan koordinasi antar lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat dalam percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal;
12. melaksanakan kegiatan pemanfaatan lahan pekarangan untuk ketahanan pangan lokal;
13. Mengembangkan pangan pokok lokal; dan
14. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

b. Subkoordinator Keamanan Pangan

Subkoordinator Keamanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi, analisis, penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan, pendampingan, pemantauan, evaluasi, pelaporan, sertifikasi, Jejaring Keamanan Pangan Daerah (JKPD), komunikasi, informasi dan edukasi keamanan pangan. Dengan rincian sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kegiatan subkoordinator Keamanan Pangan;
- b. menyiapkan bahan koordinasi dan analisis penyusunan rencana dan bahan pendampingan di bidang konsumsi pangan, promosi

penganekaragaman pangan, dan pengembangan pangan lokal kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerjasama dan informasi keamanan pangan;

- c. menyiapkan bahan pemantauan evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan pangan segar yang beredar, keamanan pangan, dan kerjasama dan informasi keamanan pangan;
- d. menyiapkan bahan sertifikasi jaminan keamanan pangan segar;
- e. melaksanakan dan mengembangkan Jejaring Keamanan Pangan Daerah (JKPD);
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan komunikasi, informasi dan edukasi keamanan pangan;
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

4. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

- Fungsional Analis Ketahanan Pangan

Fungsionalis Ketahanan Pangan mempunyai tugas melakukan analisis di bidang ketersediaan dan distribusi pangan serta bidang konsumsi dan keamanan pangan.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, berdasarkan Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan didukung dengan jumlah pegawai sebanyak 32 orang yang terdiri atas PNS sebanyak 19 orang dan Tenaga Kerja Kontrak (TKK) sebanyak 13 orang. Jumlah Pegawai Dinas Ketahanan Pangan berdasarkan Pendidikan, Pangkat/Golongan pada tahun 2022, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.1
Jumlah Pegawai Dinas
Ketahanan Pangan Berdasarkan Pangkat/Golongan Tahun 2022

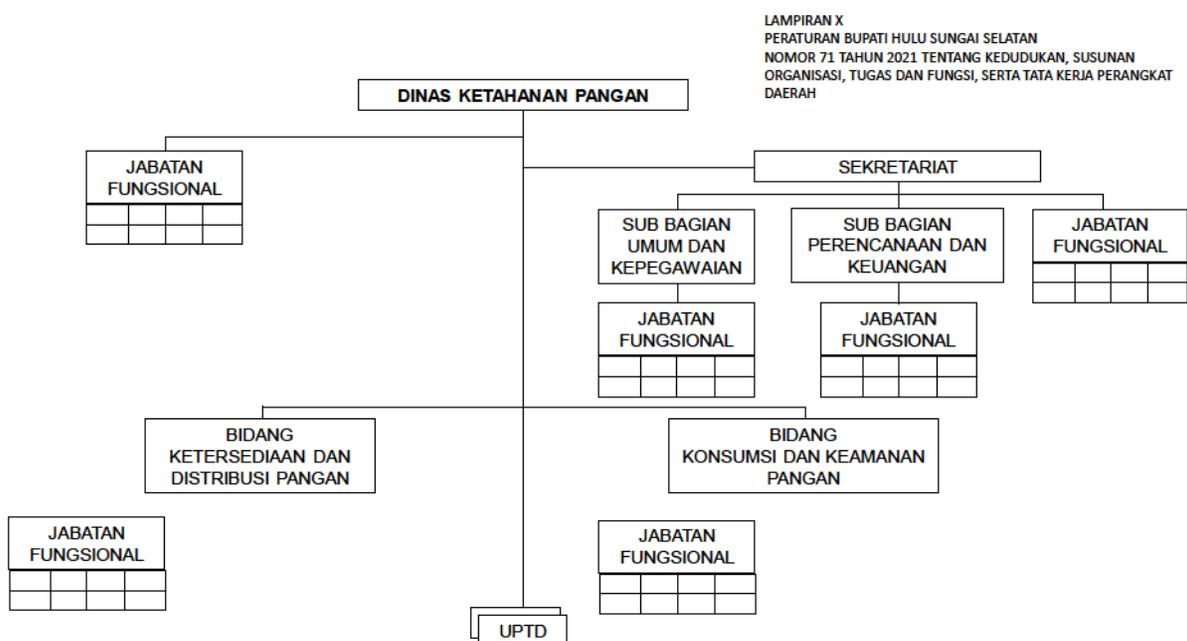
No.	Golongan	Status Kepegawaian		Jumlah
		PNS	CPNS	
1	Golongan I	-	-	0
2	Golongan II	-	1	1
3	Golongan III	9	4	13
4	Golongan IV	5	-	5
Jumlah		14	5	19

Tabel 1.2
Jumlah PNS dan TKK Dinas Ketahanan Pangan Berdasarkan
Tingkat Pendidikan Tahun 2022

No	Pendidikan	Status Kepegawaian			Jumlah
		PNS	CPNS	TKK	
1	SD	-	-	-	0
2	SMP	-	-	-	0
3	SMA/SMK	2	-	3	5
4	D3	2	1	-	3
5	S1	6	4	10	20
6	S2	4	-	-	4
JUMLAH		14	5	13	32

Adapun Bagan Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2022, lebih rinci dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1.1. Bagan Struktur Organisasi
Dinas Ketahanan Pangan
Kabupaten Hulu Sungai Selatan



D. PERAN STRATEGIS ORGANISASI

Pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 menyebutkan bahwa perumusan permasalahan perangkat daerah dan analisis isu strategis merupakan dasar untuk merumuskan tujuan dan sasaran perangkat daerah dimasa datang. Oleh karenanya perlu dilakukan perumusan permasalahan dan analisis isu strategis terhadap tujuan dan sasaran perangkat daerah. Hal ini untuk menjamin konsistensi serta sinergitas perangkat daerah antar wilayah dan antara pusat dan daerah, yang melibatkan para pemangku kepentingan (stakeholder) kabupaten, provinsi, dan nasional dalam proses perumusannya.

Pembangunan ketahanan pangan merupakan perwujudan misi yang ke 1 yaitu “Mewujudkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan bidang pendidikan, kesehatan dan pelayanan dasar lainnya” dan misi yang ke 5 yaitu “Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta pelayanan publik berkualitas berbasis teknologi informasi dalam bingkai kehidupan yang agamis”

Ketahanan pangan merupakan isu pokok dalam pemenuhan kesejahteraan masyarakat karena akan menentukan kestabilan ekonomi, sosial, dan politik dalam suatu negara. Pemenuhan kebutuhan pangan menjadi tantangan tersendiri bagi Indonesia yang merupakan Negara kepulauan. Luas wilayah Indonesia secara geografis menjadi penyebab adanya perbedaan kondisi tanah dan kecocokan terhadap jenis-jenis tanaman termasuk tanaman pangan. Perbedaan budaya bercocok tanam dan makanan pokok antar daerah juga memengaruhi pilihan masyarakat dalam memilih komoditas petani.

Konsumsi Pangan. Kelompok padi-padian sangat penting untuk diperhatikan karena tingginya konsumsi masyarakat terhadap bahan makanan tersebut. Dalam konteks ketahanan pangan, makin besar konsumsi masyarakat terhadap suatu bahan makanan, kerentanan masyarakat pada tingkat ketersediaan bahan makanan dimaksud menjadi sangat tinggi. Makin tingginya tingkat konsumsi masyarakat menjadi indikasi makin tingginya ketergantungan terhadap bahan makanan tersebut. Konsumsi pangan belum beranekaragaman, adapun faktor penyebab belum berkembangannya adalah : (1) belum berkembangnya teknologi tepat guna dan terjangkau mengenai pengolahan pangan berbasis tepung umbi-umbian lokal dan pengembangan aneka pangan lokal lainnya, (2) belum berkembangnya bisnis pangan untuk peningkatan nilai tambah ekonomi melalui penguatan kerjasama pemerintah-masyarakat-dan swasta, (3) belum optimalnya usaha perubahan perilaku

diversifikasi konsumsi pangan dan gizi sejak usia dini melalui jalur pendidikan formal dan non formal, (4) rendahnya citra pangan lokal, (5) belum optimalnya pengembangan program perbaikan gizi yang **cost effective**. Selain itu dari segi keamanan pangan juga membutuhkan perhatian, saat ini masih cukup banyak digunakan bahan tambahan pangan (penyedap, pewarna pemanis, pengawet, pengental, pemucat dan anti gumpal) yang beracun atau berbahaya bagi kesehatan. Masih kurangnya pengetahuan dan kepedulian masyarakat konsumen maupun produsen (khususnya industry kecil dan menengah) terhadap keamanan pangan, yang ditandai merebaknya kasus keracunan pangan baik produk pangan segar maupun olahan.

Ketersediaan pangan. Ketersediaan pangan berfungsi menjamin pasokan pangan untuk memenuhi kebutuhan penduduk dari segi kuantitas dan kualitas keragaman dan keamanannya. Ketersediaan pangan dapat diamati pada berbagai tingkatan mencakup rumah tangga, regional dan nasional. Namun demikian, penyediaan yang sesuai dengan kebutuhan gizi penduduk baik jumlah maupun mutunya merupakan masalah terbesar sepanjang sejarah kehidupan. Situasi ketersediaan pangan wilayah antara lain tercermin dari jumlah ketersediaan pangan, yang digambarkan dari ketersediaan pangan maupun mutu keanekaragaman ketersediaan pangan.

Cadangan pangan. Adanya kondisi iklim yang tidak menentu sehingga sering terjadi pergeseran penanaman, masa pemanenan yang tidak merata sepanjang tahun memerlukan sistem pencadangan pangan yang baik. Saat ini belum optimalnya :(1) sistem cadangan pangan daerah untuk mengantisipasi kondisi darurat bencana alam minimal 3 (tiga) bulan , (2) cadangan pangan hidup (pekarangan, lahan desa, lahan tidur, tanaman bawah tegakan perkebunan), (3) kelembagaan lumbung pangan masyarakat dan lembaga cadangan pangan komunitas lainnya, (4) sistem cadangan pangan melalui Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan ataupun lembaga usaha lainnya. Komoditas pangan merupakan kebutuhan pokok masyarakat. Untuk itu, pemenuhannya harus disegerakan. Dalam kaitan ini, kelambatan pemenuhan pangan akan menyebabkan harga pangan tinggi dan bergejolak (volatilitas tinggi). Hal ini tentunya akan berimplikasi pada sulitnya mengendalikan harga dan menurunnya kesejahteraan masyarakat. Di Indonesia, komoditas pangan menyumbang peran cukup besar pada inflasi. Dari beberapa komoditas utama penyumbang inflasi 15 diantaranya merupakan komoditas pangan. Dengan kata lain, ketidakstabilan harga komoditas pangan di Indonesia banyak dipengaruhi oleh permasalahan **supply**. Ketidakstabilan harga pangan di

Indonesia juga disebabkan oleh sifat komoditas pangan yang musiman dan sangat terpengaruh oleh kondisi alam seperti tanah, perubahan musim, dan juga letak geografis daerah. Faktorfaktor ini akan memengaruhi ketersediaan stok tiap bulannya. Pada musim panen **supply** meningkat, sehingga harga relatif rendah. Namun, pada saat musim paceklik atau di luar musim panen stok menjadi terbatas. Selain itu, permasalahan distribusi juga menjadi hambatan tersendiri pada masalah transportasi barang antardaerah. Panjangnya rantai pemasaran komoditas pangan juga menyebabkan ketidakefisienan dalam pemasaran barang dan menyebabkan tingginya harga barang komoditas pangan. Isu stabilitas harga pangan penting karena : (1) masa panen yang tidak merata sepanjang bulan, sehingga harga tinggi pada masa panen dan rendah pada waktu musim panen, (b) harga pangan dunia semakin tidak menentu, dan Indonesia sangat rentang terhadap pengaruh pasar dunia. Disamping itu dengan adanya stabilitas harga pangan akan menguatkan posisi tawar petani dan menjamin akses pangan masyarakat.

E. SISTEMATIKA PELAPORAN

Adapun sistematika penyusunan Laporan Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2022 sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tugas dan fungsi organisasi, dan peran strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan

BAB II : PERENCANAAN KINERJA

Bab ini menjelaskan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran tahun 2022, perjanjian kinerja beserta pengukuran kinerja

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini menyajikan data serta capaian kinerja setiap sasaran dalam perjanjian kinerja sesuai hasil pengukuran serta realisasi anggaran tahun 2022.

BAB IV : PENUTUP

LAMPIRAN –LAMPIRAN

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2022 mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

A. Rencana Strategis

2.1. Visi dan Misi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Visi Kabupaten Hulu Sungai Selatan merupakan gambaran kondisi masa depan yang dicita-citakan dapat terwujud dalam kurun waktu lima tahun yaitu Tahun 2018-2023. Sebagai gambaran tentang apa yang ingin diwujudkan di akhir periode perencanaan, maka visi tersebut dapat disebut sebagai Visi Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang akan diwujudkan pada akhir Tahun 2023 untuk menggambarkan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan bersama pemerintah daerah, DPRD, dunia usaha, dan masyarakat pada umumnya.

Berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023, Visi pembangunan daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk periode RPJMD 2018-2023 sesuai dengan visi kepala daerah terpilih adalah sebagai berikut.

**“Menuju Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang Cerdas, Inovatif,
Teknologis dan Agamis untuk Mewujudkan Kesejahteraan Dunia dan
Akhira”.**

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara program dan kegiatan tanpa mengabaikan mandat yang diberikan. Misi Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah:

- a. Mewujudkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan bidang pendidikan, kesehatan dan pelayanan dasar lainnya
- b. Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan berbasis potensi sumber daya alam dan kearifan lokal.
- c. Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur fisik dan sosial yang menunjang sektor perekonomian

- d. Mengoptimalkan sumber daya daerah, berbasis pemberdayaan masyarakat, pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
- e. Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta pelayanan publik berkualitas berbasis teknologi informasi dalam bingkai kehidupan yang agamis.

Pembangunan ketahanan pangan merupakan perwujudan misi yang ke 1 yaitu *“Mewujudkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan bidang pendidikan, kesehatan dan pelayanan dasar lainnya”* dan misi yang ke 5 yaitu *“Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta pelayanan publik berkualitas berbasis teknologi informasi dalam bingkai kehidupan yang agamis”*

Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan No 71 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah. Tugas pokok Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah membantu bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang penyelenggaraan pangan berdasarkan kedaulatan dan kemandirian, penyelenggaraan pangan, penanganan kerawanan pangan dan keamanan pangan serta tugas lain yang diberikan Bupati sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas Dinas Ketahanan Pangan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penetapan rencana strategis, program dan anggaran Dinas Ketahanan Pangan;
- b. Perumusan kebijakan bidang penyelenggaraan pangan berdasarkan kedaulatan dan kemandirian, penyelenggaraan pangan, penanganan kerawanan pangan dan keamanan pangan;
- c. Pelaksanaan kebijakan bidang penyelenggaraan pangan berdasarkan kedaulatan dan kemandirian, penyelenggaraan pangan, penanganan kerawanan pangan dan keamanan pangan;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang penyelenggaraan pangan berdasarkan kedaulatan dan kemandirian, penyelenggaraan pangan, penanganan kerawanan pangan dan keamanan pangan;
- e. pelaksanaan administrasi Dinas Ketahanan Pangan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.2. Tujuan dan Sasaran Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Tujuan merupakan target-target yang bersifat kuantitatif dari suatu organisasi, dimana pencapaian target-target tersebut merupakan ukuran dari keberhasilan kinerja faktor-faktor penentu keberhasilan suatu organisasi. Oleh karena itu, tujuan merupakan bagian integral dari proses manajemen strategi yang didalamnya mengandung usaha untuk melaksanakan keinginan. Sasaran organisasi merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis organisasi sehingga harus disusun secara konsisten dengan perumusan visi, misi dan tujuan organisasi. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kaitannya dengan pencapaian kinerja yang diinginkan.

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Dimana tujuan dan sasaran perangkat daerah harus berpedoman pada RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2022.

Penjabaran tujuan, sasaran dan indikator sasaran adalah sebagaimana tertuang dalam Tabel 2.1 berikut ini.

Tabel 2.1
Indikator Kinerja Sasaran Strategis pada Rencana Strategis
Dinas Ketahanan Pangan Kab HSS

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Tujuan/Sasaran	Realisasi		Target		
				2020	2021	2020	2021	2022
1.	Meningkatkan kemampuan pemenuhan kebutuhan pangan daerah	Meningkatnya ketersediaan, keterjangkauan, konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman	Pola Pangan Harapan Ketersediaan	85.48	86.33	85.46	86.31	87.17
			Pola Pangan Harapan Konsumsi	86.2	89.1	83.65	84.48	85.32

Sumber data Renstra DisKP 2018-2023 2

B. Rencana Kerja Dan Anggaran Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan dan sasaran strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan kedalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Sebagai upaya untuk mewujudkan visi organisasi melalui perwujudan

sasaran-sasaran sesuai visi dan misi yang telah ditetapkan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dapat dirincikan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan kegiatan:
 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan, dengan kegiatan:
 - Penyediaan infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
3. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan, dengan kegiatan:
 - Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
 - Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota
 - Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Per Kapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi
4. Program Pengawasan Keamanan Pangan, dengan kegiatan:
 - Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota

Program dan Kegiatan Pembangunan Sumber Dana DPA APBD Dinas Ketahanan Pangan Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2022 Yang Mendukung Pencapaian Sasaran dan Kinerja berjumlah Rp 7.719.406.166 yang dijabarkan dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan, sebagaimana dalam tabel 2.2 berikut :

Tabel. 2.2
Anggaran Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2022

PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 3.908.845.716	Rp. 3.432.288.716
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 7.599.900	Rp. 7.599.900
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp. 6.399.900	Rp. 6.399.900
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 1.200.000	Rp. 1.200.000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 3.502.955.416	Rp. 3.035.220.416
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp. 3.498.955.616	Rp. 3.031.220.616
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Rp. 1.599.800	Rp. 1.599.800
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Rp. 1.200.000	Rp. 1.200.000
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi	Rp. 1.200.000	Rp. 1.200.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 209.629.400	Rp. 204.807.400
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Rp. 3.127.500	Rp. 3.127.500
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 32.176.900	Rp. 32.176.900
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp. 47.335.000	Rp. 51.335.000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp. 25.890.000	Rp. 25.890.000
Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Rp. 3.600.000	Rp. 3.600.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 97.500.800	Rp. 88.678.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 7.935.000	Rp. 7.935.000
Pengadaan Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp. 7.935.000	Rp. 7.935.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 98.376.000	Rp. 94.676.000
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp. 3.000.000	Rp. 500.000
Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 32.844.000	Rp. 31.644.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp. 62.532.000	Rp. 62.532.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 82.350.000	Rp. 82.050.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp. 50.650.000	Rp. 50.350.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp. 21.000.000	Rp. 21.000.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp. 10.700.000	Rp. 10.700.000
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Rp. 175.000.000	Rp. 2.175.000.000
Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 175.000.000	Rp. 2.175.000.000
Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	0	Rp. 1.883.800.000
Penyediaan Infratraktur Lantai Jemur	Rp. 175.000.000	Rp. 291.200.000
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Rp. 583.296.800	Rp. 2.081.727.550

Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Rp. 165.794.000	Rp. 240.177.550
Pemantau Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Rp. 92.594.000	Rp. 88.004.000
Pengembangan kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Rp. 73.200.000	Rp. 152.173.550
Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Rp. 326.653.800	Rp. 925.353.800
Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Rp. 322.653.800	Rp. 921.353.800
Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Rp. 4.000.000	Rp. 4.000.000
Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan angka Kecukupan Gizi	Rp. 90.849.000	Rp. 916.196.200
Penyusun dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Rp. 8.160.000	Rp. 6.940.000
Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Rp. 76.390.000	Rp. 903.437.200
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Rp. 6.299.000	Rp. 5.819.000
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Rp. 30.389.900	Rp. 30.389.900
Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 30.389.900	Rp. 30.389.900
Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 8.720.000	Rp. 8.720.000
Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 3.240.000	Rp. 3.240.000
Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 3.829.900	Rp. 3.829.900
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 14.600.000	Rp. 14.600.000
TOTAL PAGU TAHUN 2022	Rp. 4.697.532.416	Rp. 7.719.406.166

C. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan dokumen untuk melaporkan capaian kinerja, dan menilai keberhasilan Dinas Ketahanan Pangan Kab. Hulu Sungai Selatan tahun 2022. Dalam dokumen perjanjian kinerja tahun 2022 tersebut diuraikan sasaran-sasaran dalam Renstra yang diprioritaskan untuk dicapai, indikator kinerja yang digunakan untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran beserta target yang harus dicapai tahun 2022, program-program, dan anggaran yang disediakan untuk mendukung pencapaian masing-masing sasaran. Sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dinas Ketahanan Pangan Kab. Hulu Sungai Selatan telah menyusun Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022 sebagai acuan tolak ukur evaluasi akuntabilitas kinerja yang akan dicapai pada tahun 2022, sebagai berikut :

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2022

Unit Organisasi Eselon II : Dinas Ketahanan Pangan
Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2022

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya ketersediaan, keterjangkauan, konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman	Skor PPH Ketersediaan	87,17
		Skor PPH Konsumsi	85,32
2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Nilai / Predikat AKIP	A (86,42)

Program	Anggaran
1. Program Pengelolaan Sumberdaya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Rp. 2.175.000.000
2. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan	Rp. 2.081.727.550
3. Program Pengawasan Keamanan Pangan	Rp. 30.389.900
4. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Rp. 3.432.288.716
Total	Rp. 7.719.406.106

Kandangan, 30 September 2022

Pihak Kedua,
Bupati Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Drs. H. ACHMAD FIKRY, M.AP

Pihak Pertama,
Kepala Dinas Ketahanan Pangan
Kabupaten Hulu Sungai Selatan



I. H. AKHMAD MAWARDI

Pembina Utama Muda
NIP. 19651129 199703 1 001

D. Indikator Kerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari satu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, maka dilakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Sebagai bahan perbandingan juga dijelaskan Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2022. Perbandingan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Ketahanan Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dinas Ketahanan Pangan Kab. Hulu Sungai Selatan
Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/ Formulasi Perhitungan
1	2	3	5
1.	Meningkatnya ketersediaan, keterjangkauan, konsumsi pangan yang beragam, bergisi, seimbang dan aman	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	Skor PPH = \sum (%) AKE dikali Bobot Skor PPH Ketersediaan dihitung berdasarkan data Neraca Bahan Makanan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Di dalam Neraca Bahan Makanan (NBM) disajikan angka rata-rata jumlah jenis Bahan Makanan yang tersedia untuk dikonsumsi penduduk per kapita pertahun dalam kilogram serta per kapita per hari dalam satuan gram, pada kurun waktu tertentu.
		Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	PPH Konsumsi merupakan susunan beragam pangan yang didasarkan atas proporsi keseimbangan energi dari berbagai kelompok pangan untuk memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi lainnya, baik dalam jumlah maupun mutu dengan mempertimbangkan segi daya terima, ketersediaan pangan, ekonomi, budaya dan agama. Definisi lain menyatakan PPH sebagai komposisi kelompok pangan utama yang bila dikonsumsi dapat memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi lainnya

E. PENGUKURAN KINERJA ATAS PERJANJIAN KINERJA

Pengukuran kinerja sebagai dasar dalam menilai berbagai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran maupun tujuan yang ditetapkan. Pengukuran kinerja adalah merupakan hasil dari penilaian sistematis dan didasarkan pada indikator kinerja kegiatan berupa masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan dan kinerja sasaran, dengan memanfaatkan data pencapaian kinerja hasil pelaksanaan program dan kegiatan.

Kinerja kegiatan merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan. Kinerja sasaran merupakan tingkat pencapaian masing-masing indikator sasaran. Pengukuran tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pencapaian hasil pengukuran kinerja kegiatan. Pengukuran capaian kinerja kegiatan di Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, telah menggunakan indikator kuantitatif, hal ini dilakukan supaya lebih terukur dan mudah dievaluasi, penetapan indikator yang digunakan dalam setiap kegiatan disesuaikan dengan sifat kegiatan masing-masing, sehingga kegiatan-kegiatan tersebut dapat diukur pencapaiannya.

Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil persentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih dari 100% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100%. Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Adapun untuk pengukuran kinerja disajikan sebagaimana tabel 2.5 di bawah ini :

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk melaporkan secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban pertanggungjawaban melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Reviu Tahun 2018-2019 maupun Renja Tahun 2022.

Sesuai dengan ketentuan tersebut, keberadaan sasaran dan indikator kinerja sangatlah mutlak, karena hal tersebut digunakan untuk menilai keberhasilan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, dan hasil kegiatan. Indikator kinerja harus memenuhi kriteria spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan, harus selaras dengan target kinerja RPJMD Kabupaten HSS 2018-2023. Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Tujuan dan Sasaran Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Pencapaian Indikator Kinerja Utama terdapat pada Sasaran dan Indikator Kinerja.

Pengukuran Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2022 diukur dari pencapaian indikator Kinerja yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja tahun 2022 dengan rata-rata capaian kinerja pada tahun 2022 adalah sebesar 102,95% yang dihitung dari rata-rata capaian dari 2 indikator kinerja yang terdiri dari Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan dan Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi. Adapun hasil pengukuran atas pencapaian kinerja tahun 2022 adalah sebagai berikut :

SASARAN :
“Meningkatnya Ketersediaan, Keterjangkauan, Konsumsi Pangan Yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman”

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	Skor	87,17	87,54	100,42 %
	Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Skor	85,32	90,0	105,48 %

B. Analisis Capaian Kinerja

1. Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan

Sasaran Strategis : “Meningkatnya Ketersediaan, Keterjangkauan, Konsumsi Pangan Yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman”					
No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	Skor	87,17	87,54	100,42 %

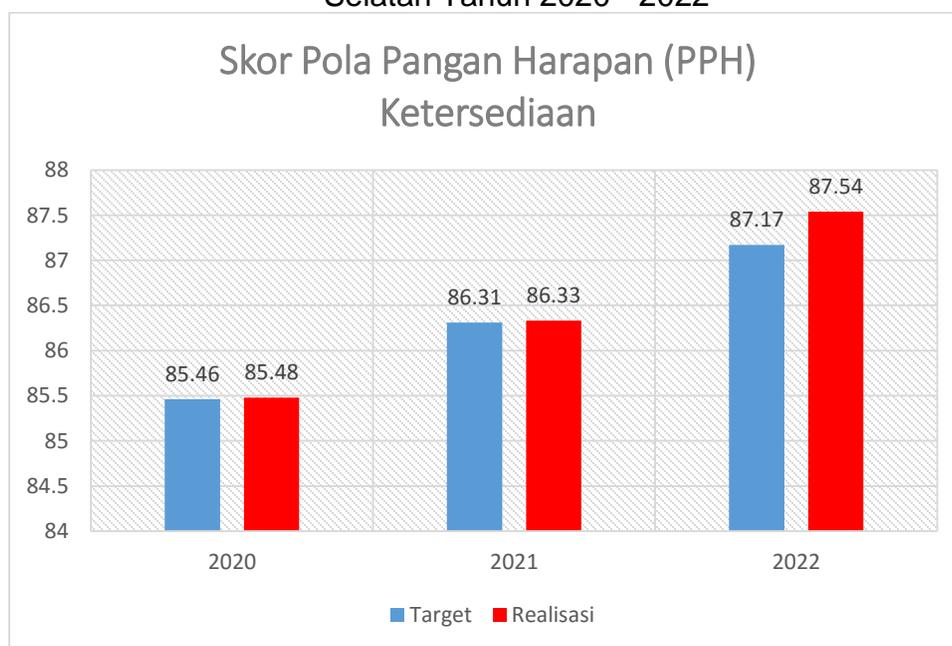
Salah satu alat ukur yang digunakan untuk menggambarkan kondisi keberagaman ketersediaan pangan suatu wilayah (makro) adalah pola pangan Harapan (PPH) Ketersediaan pangan. Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Analisis PPH ketersediaan dimanfaatkan untuk (1) Evaluasi penyediaan pangan wilayah, (2) Perencanaan penyediaan pangan ideal suatu wilayah dan (3) Dapat digunakan untuk menghitung target produksi wilayah.

Tabel Pola Pangan Harapan (PPH) Tingkat Ketersediaan Berdasarkan Neraca Bahan Makanan Nasional Tahun 2022

No.	Kelompok Bahan Pangan	Energi (Kalori)	% AKE	Bobot	Skor riil	Skor PPH	Skor Maks	Ket
1.	Padi-padian	9,583	399.3	0.5	199.65	25.00	25.0	
2.	Umbi-umbian	78	3.3	0.5	1.63	1.63	2.5	
3.	Pangan Hewani	294	12.2	2.0	24.47	24.00	24.0	
4.	Minyak dan Lemak	474	19.7	0.5	9.87	5.00	5.0	
5.	Buah/biji berminyak	35	1.4	0.5	0.72	0.72	1.0	
6.	Kacang-kacangan	79	3.3	2.0	6.57	6.57	10.0	
7.	Gula	157	6.5	0.5	3.26	2.50	2.5	
8.	Sayuran dan buah	106	4.4	5.0	22.11	22.11	30.0	
9.	Lain-lain	-	-	-	-	-	-	
	Jumlah	10,805	450.2		268.29	87.54	100.0	

Berikut Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 – 2022 dapat dilihat pada grafik 3.3 berikut :

Grafik Skor Pola Pangan Harapan Ketersediaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 - 2022



Berdasarkan grafik di atas terlihat perkembangan realisasi skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan yang dihitung menggunakan perhitungan Neraca Bahan Makanan (NBM). Tiga tahun terakhir skor PPH Ketersediaan yang diperoleh Kabupaten Hulu Sungai Selatan terus mengalami peningkatan. Tahun ini (2022) skor PPH Ketersediaan ditarget sebesar 87,17 dan berhasil

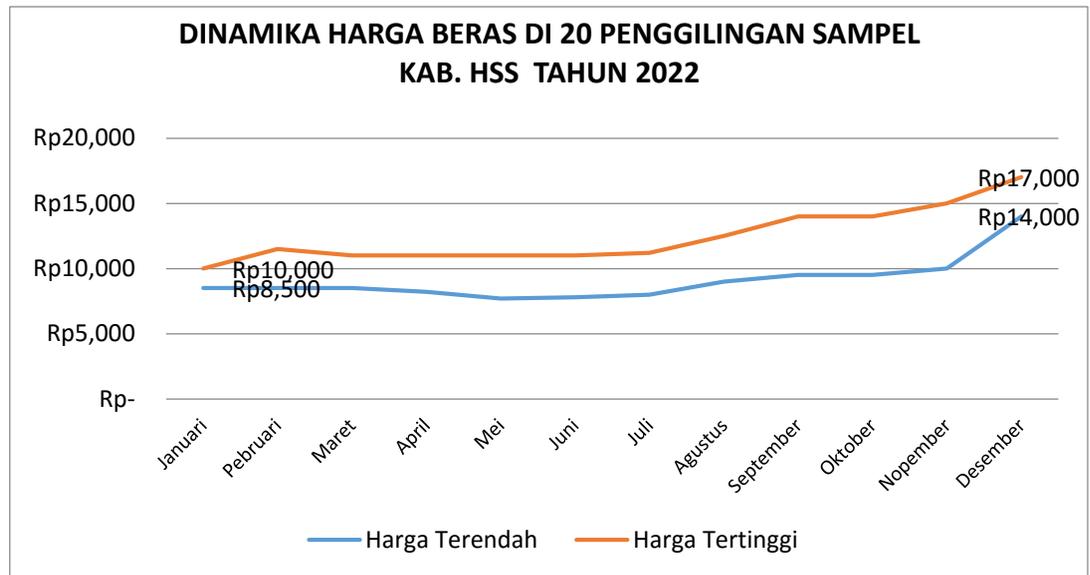
terrealisasikan sebesar 87,54. Realisasi yang diperoleh melebihi target yang ditetapkan untuk tahun 2022. Tingkat capaian realisasi terhadap target sebesar 100.42%. Hasil yang diperoleh ini tentu sangat memuaskan karena melebihi target yang diharapkan.

Seperti yang terlihat pada grafik, terjadi kenaikan skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan dari tahun 2020 hingga tahun 2022. Dalam tiga tahun tersebut juga realisasi yang dicapai melebihi target yang direncanakan. Pada tahun 2020, target skor PPH Ketersediaan adalah sebesar 85,46. Realisasi yang dicapai pada tahun itu adalah sebesar 85,48. Tahun berikutnya (2021) target PPH Ketersediaan yang ingin dicapai adalah sebesar 86,31 berhasil terrealisasikan dengan skor 86,33. Pada tahun 2022 ini target yang ditetapkan adalah sebesar 87,17 dan berhasil direalisasikan PPH Ketersediaan dengan skor 87,54. Tiga tahun berturut-turut Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan berhasil mencapai angka realisasi yang lebih tinggi dibandingkan target untuk indikator PPH Ketersediaan.

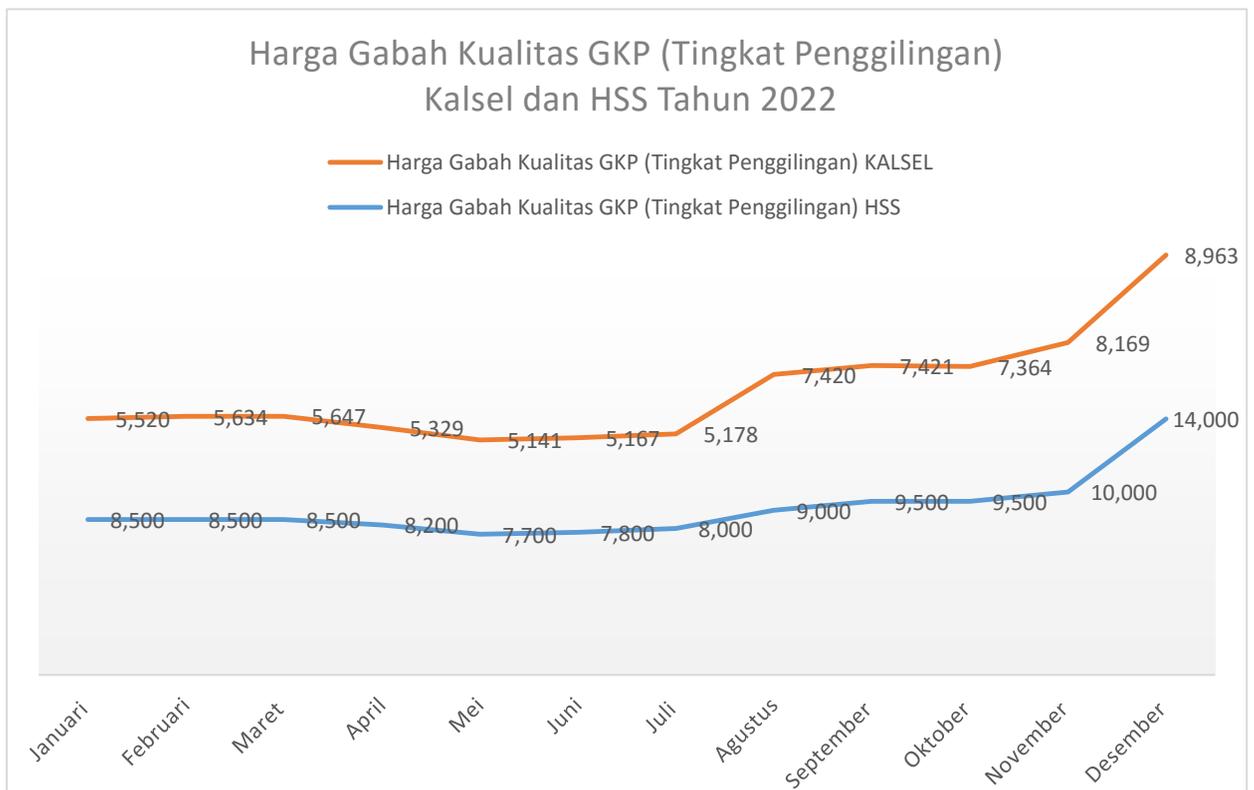
Ketersediaan beras yang memadai dengan harga yang terjangkau sangat fundamental bagi setiap individu dan negara Indonesia secara keseluruhan. Ketersediaan beras sangat dipengaruhi oleh produksi domestik, ekspor, impor, dan stok/cadangan beras. Cadangan beras nasional terdiri dari cadangan beras pemerintah dan cadangan beras masyarakat. Cadangan beras masyarakat berada di rumah tangga petani, pedagang, penggilingan, rumah tangga konsumen, hotel dan industri pengolahan. Pengelolaan Cadangan beras bertujuan untuk mengatasi masalah pangan, terutama untuk menjamin akses dan kecukupan pangan bagi masyarakat.

Penggilingan Padi merupakan bagian dari rantai pasok beras nasional dan memiliki kontribusi penting dalam penyediaan beras dari segi kuantitas dan kualitas untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Penggilingan memiliki peranan penting antara lain : (1) menyediakan beras untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat; (2) menjadi titik sentral pengolahan atau perubahan bentuk padi menjadi beras; (3) menentukan kuantitas dan kualitas beras; (4) menentukan harga gabah dan beras; dan (5) membuka peluang lapangan pekerjaan di wilayah sekitar. Berikut perbandingan harga beras pada tingkatan penggilingan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan tingkat penggilingan di Kalimantan Selatan dapat dilihat pada grafik 3.2 berikut :

Grafik Dinamika Harga Beras pada penggilingan (Sampel) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2022



Pada Grafik terlihat Fluktuasi harga gabah pada tingkat penggilingan, harga gabah pada tingkat penggilingan mengalami penurunan pada bulan April namun meningkat kembali pada bulan Agustus 2022 disaat musim panen tiba namun masyarakat mengalami gagal panen. Gagal panen atau puso dialami petani di Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) yang disebabkan oleh hama wereng dan juga anomali cuaca yang tidak menentu sehingga hama tungro berkembangbiak dengan subur. Luasan lahan pertanian padi yang gagal panen mencapai 1.747,29 hektare dari luas lahan tanam 21.661,00 hektare atau mencapai 60 hingga 80 persen.



Inflasi merupakan salah satu indikator pembangunan ekonomi ditandai dengan keadaan dimana harga-harga meningkat secara terus menerus, naiknya biaya produksi, serta permintaan barang/jasa yang meningkat. Pergerakan inflasi tahunan Kalimantan Selatan pada bulan Desember 2022 mengalami peningkatan 6,99% atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 116,34 pada November 2022 menjadi 117,15 pada Desember 2022.

Inflasi bulan Desember 2022 ini terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sepuluh indeks kelompok pengeluaran secara signifikan. Kelompok yang mengalami kenaikan yaitu kelompok transportasi sebesar 18,27 persen; kelompok rekreasi, olahraga dan budaya sebesar 10,43 persen; kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 8,84 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 7,01 persen; kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 8,60 persen; kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 5,79 persen; kelompok pendidikan sebesar 5,49 persen; kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar lainnya sebesar 3,48 persen; kelompok penyediaan makanan dan restoran sebesar 2,09 persen; dan kelompok kesehatan sebesar 1,48 persen. (Sumber : Berita resmi Statistik, Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan, Desember 2022)

Capaian Angka stabilitas harga pangan di tahun 2022 tercapai sebesar 13.06% dari target renstra Dinas Ketahanan Pangan maksimal fluktuasi harga 5.40% dengan data pada tabel berikut :

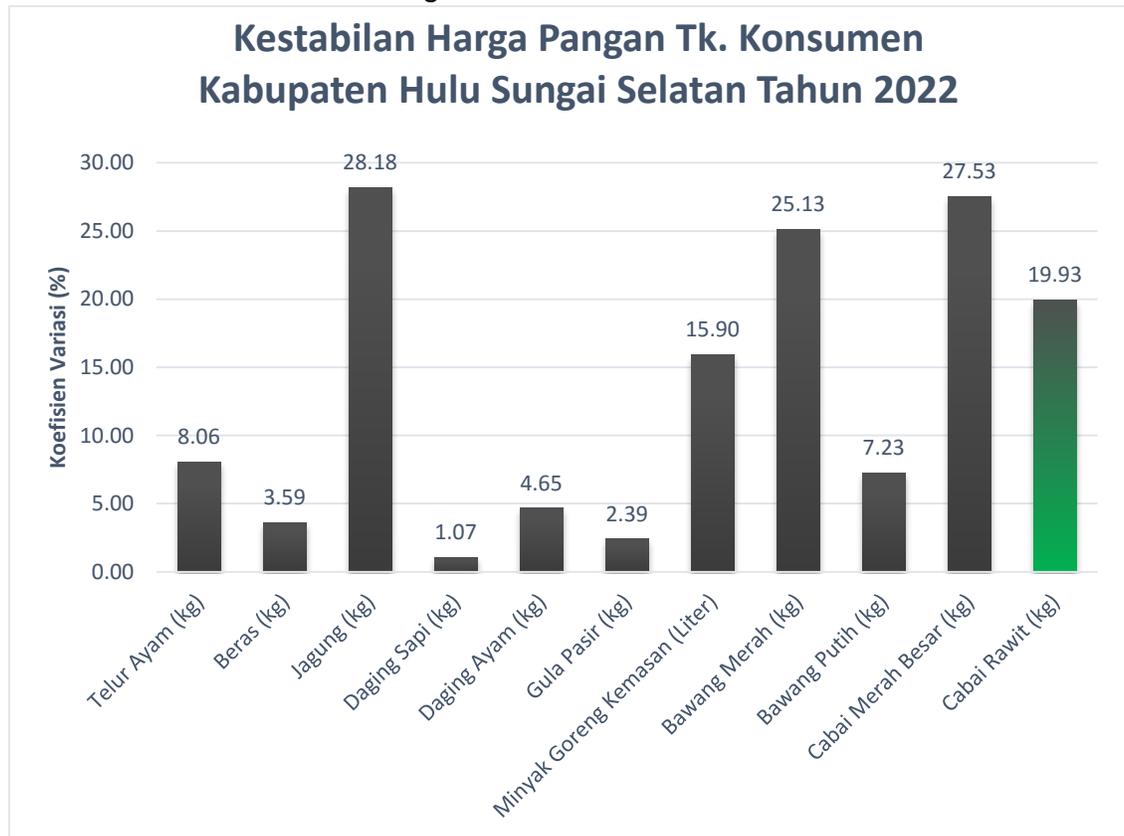
Tabel
**Perkembangan dan Tingkat Kestabilan Harga Pangan Pokok dan Strategis Kabupaten
Hulu Sungai Selatan Tahun 2022**

Komoditas	Bulan												Harga tertinggi	Harga terendah	rata rata	CV (%)
	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES				
Telur Ayam (kg)	27,097	23,821	25,467	25,800	27,935	30,000	29,774	30,097	30,533	29,000	29,069	30,935	30,935	28,294	8.06	
Beras (kg)	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,871	16,000	16,000	16,181	16,250	16,250	15,000	3.59	
Jagung (kg)	4,600	4,600	4,600	4,600	4,600	4,600	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	4,600	28.18	
Daging Sapi (kg)	130,000	130,000	130,000	130,667	134,839	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	134,839	130,000	1.07	
Daging Ayam (kg)	38,129	38,750	35,600	36,467	36,806	40,133	34,419	34,452	37,133	38,484	38,103	37,323	40,133	34,419	4.65	
Gula Pasir (kg)	14,290	14,000	14,000	14,033	14,484	14,067	13,887	14,000	13,500	13,500	13,500	13,500	14,484	13,500	2.39	
Minyak Goreng Kemasan (Liter)	20,000	16,071	20,267	25,000	25,000	25,000	23,871	20,000	19,933	18,839	17,100	17,000	25,000	16,071	15.90	
Bawang Merah (kg)	27,903	34,536	40,900	32,800	42,677	54,400	66,774	41,170	36,700	35,968	41,966	38,452	66,774	27,903	25.13	
Bawang Putih (kg)	27,581	29,500	29,500	29,367	28,903	26,133	25,290	25,000	26,167	25,194	25,000	25,000	29,500	25,000	7.23	
Cabai Merah Besar (kg)	50,161	47,500	56,333	66,167	59,839	84,000	94,194	99,677	80,667	60,323	58,333	44,839	94,194	44,839	27.53	
Cabai Rawit (kg)	117,258	95,000	107,667	68,833	62,581	106,833	114,194	100,968	100,000	90,323	70,000	80,323	117,258	62,581	19.93	
Rata – Rata															13.06	

Sumber : Data Diolah Tahun 2022

Keterangan : Nilai CV diatas 10% artinya komoditas bahan pangan mengalami fluktuasi harga yang sangat signifikan

Grafik
Kestabilan Harga Pangan Tingkat Konsumen Kabupaten
Hulu Sungai Selatan Tahun 2022



Berdasarkan tahun 2022, inflasi *volatile goods* masih didominasi bahan makanan, sehingga sering disebut juga sebagai *volatile foods*. (BPS, 2022). Jika harga pangan meningkat, maka inflasi mengalami kenaikan. Naiknya harga pangan tersebut menyebabkan turunnya daya beli masyarakat (BPS, 2022). Inflasi yang rendah dan stabil merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan yang pada akhirnya memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat (BI,2022).

Penelitian fluktuasi harga pangan dilakukan oleh Muhammad Firdaus (2021) tentang fluktuasi pangan di Indonesia. Penelitian ini mengukur variabilitas dengan menggunakan koefisien variasi dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$kv = \frac{S}{x} \times 100\%$$

Kv = Koefisien Variasi

S = Simpangan baku (Rupiah)

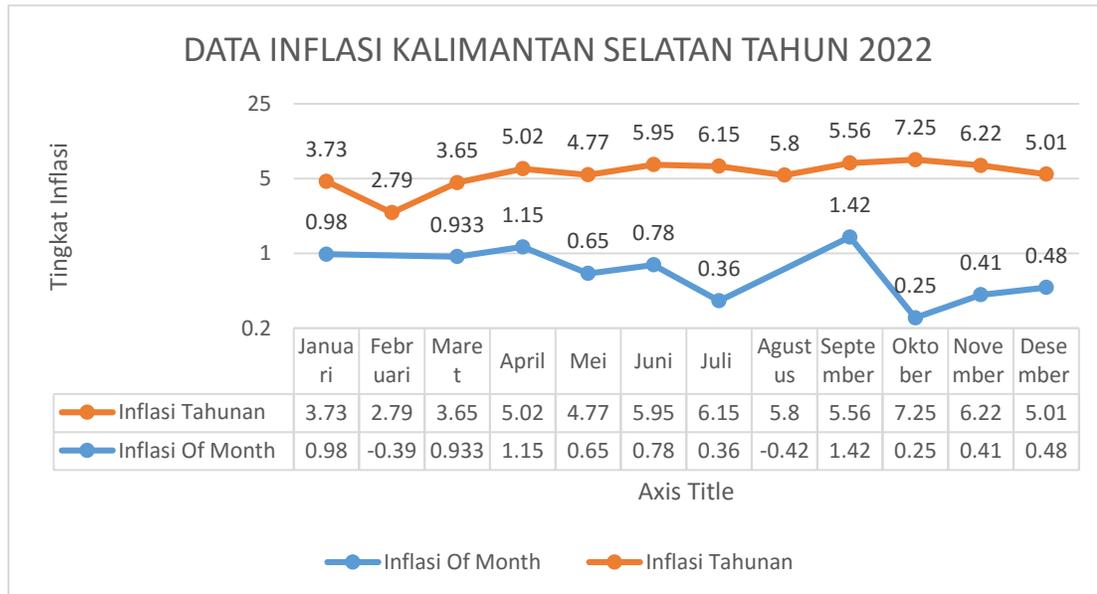
\bar{x} = rata-rata komoditas pangan (Rupiah)

Tabel Koefisien Variasi Komoditas di Bandingkan dengan Koefisien Variasi standar dari BPN

KOMODITAS	KV (%)	KV Standar BAPANAS	Selisih
Telur Ayam (kg)	8.06	10	1.94
Beras (kg)	3.59	10	6.41
Jagung (kg)	28.18	10	-18.18
Daging Sapi (kg)	1.07	10	8.93
Daging Ayam (kg)	4.65	10	5.35
Gula Pasir (kg)	2.39	10	7.61
Minyak Goreng Kemasan (Liter)	15.90	10	-5.90
Bawang Merah (kg)	25.13	25	-0.13
Bawang Putih (kg)	7.23	25	17.77
Cabai Merah Besar (kg)	27.53	30	2.47
Cabai Rawit (kg)	19.93	30	10.07
Rata - rata	13.06		
Target maksimal 5,40%			

Dari beberapa tabel yang ada di atas dapat disimpulkan bahwa Pemanfaatan hasil pemantauan dan analisis harga pangan terkait dengan pemahaman dan interpretasi dari hasil analisis untuk selanjutnya dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi perumusan kebijakan di bidang pangan, utamanya yang terkait dengan kebijakan peningkatan produksi, harga dan permintaan pangan.

Grafik Data Inflasi Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022



Langkah Kongkrit Penanganan Inflasi di Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Inflasi merupakan suatu kejadian yang sangat mengkhawatirkan terutama pada Negara atau Daerah yang padat penduduk, dimana dengan maka akan sangat berpengaruh terhadap jumlah uang yang beredar di masyarakat. Ketika jumlah uang beredar berlebih pada masyarakat maka akan terjadi inflasi yang cukup tinggi. Hal ini akan menyebabkan harga-harga barang dan jasa meningkat sehingga masyarakat sangat sulit dalam mencukupi kebutuhan pokoknya. Inflasi dapat diatasi dengan beberapa kebijakan seperti kebijakan moneter dan kebijakan fiskal.

Kenaikan harga BBM yang telah ditetapkan pemerintah menyebabkan efek domino terhadap kehidupan masyarakat seperti inflasi, biaya transportasi hingga lonjakan harga pangan. Tingginya harga energi dan pangan global saat ini juga diperkirakan akan terus menekan terjadinya inflasi jika tidak dilakukan penanganan. Dengan alasan tersebut, perlu dilakukan upaya-upaya penanganan inflasi di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Berdasarkan analisis hasil pemantauan stok dan harga pangan secara harian Dinas Ketahanan Pangan menyimpulkan adanya kenaikan harga pangan pokok

strategis secara signifikan melebihi angka yang ditetapkan dalam RENSTRA Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten HSS yakni sebesar 5,40%, menetapkan kebijakan penanganan terhadap inflasi di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.



1. Regulasi Pengendalian Inflasi Daerah

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 mengamantkan bahwa Pemerintah mengupayakan kondisi daerah yang Tahan Pangan yakni kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Dalam situasi normal maupun dam keadaan darurat (Bencana alam, cuaca ekstrim, dll), perang atau krisis ekonomi.

Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pemerintah berkaitan dengan penetapan Cadangan Pangan Pemerintah dengan mempertimbangkan upaya pengendalian dan stabilisasi harga dan pasokan Pangan Pokok Tertentu pada tingkat produsen dan konsumen.

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Berdasarkan Perda tersebut di atas, telah terbit Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Cadangan Pemerintah Daerah pasal 9 huruf (b) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah kepada masyarakat karena gejolak harga dilakukan melalui mekanisme operasi pasar dengan harga jual beras yang ditetapkan oleh pemerintah. Ini Administered price atau harga yang diatur adalah **harga barang yang mengacu pada keputusan administratif, bukan berdasarkan permintaan atau penawaran pasar**. Pada Rencana Strategi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2018-2023 target fluktuasi harga pangan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2022 maksimal 5,40% dan di akhir masa jabatan Bupati 2023 turun menjadi 5,35%.

2. Mobilisasi Pangan

Upaya mobilisasi pangan dilaksanakan dalam rangka mengatur dan mengendalikan peredaran pangan, yakni kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran Pangan kepada masyarakat, baik diperdagangkan maupun tidak. Mobilisasi dalam bentuk penyaluran pangan tahun 2022 dilaksanakan karena adanya kelompok petani yang gagal tanam dan gagal panen di beberapa desa (daerah defisit), pada bulan Juli 2022 antara lain dari daerah yang mengalami gagal panen sebanyak 2.158 KK, dengan jumlah bantuan beras per KK untuk 1 bulan pertama, total beras CPP yang disalurkan 21.580 kg dengan rincian Kecamatan Sungai Raya 708 KK, Simpur 1.395 KK, Padang Batung 29 KK, Telaga Langsung 24 KK, dan Kecamatan Angkinang 2 KK.

Adapun bulan November 2022 penanganan rawan pangan untuk masyarakat/petani yang gagal panen dan kurang mampu di Desa Muning Baru dan Muning Tengah Kecamatan Daha Selatan, yang berkategori rawan pangan adalah perlu menyalurkan Cadangan Pangan Pemerintah untuk 177 KK, masing-masing selama 1 bulan @ 10 kg = 1.770 kg, total CPP yang disalurkan sebanyak 1.770 kg



Gambar Penyerahan Bantuan Beras Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2022

Peredaran pangan antar kabupaten dari daerah surplus pangan ke daerah defisit pangan telah dirancang kerja sama antar daerah. Pemerintah Daerah yang telah kita laksanakan penjajakan kerja sama adalah pemerintah Tabalong dan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala. Komoditas yang berpotensi dikerjasamakan meliputi beras dan sayur. Ketersediaan stock pangan di provinsi atau kabupaten lainnya akan terus dilaksanakan dengan prinsip kerja sama *Government to Government (G to G)* dan sekaligus *Busines to Busines (B to B)*.

Kolaborasi mobilsasi pangan antara lain dilaksanakan oleh Dinas Sosial melalui program Pemberian Bantaun Beras Sejahtera Daerah (RASTRADA). Program Rastrada merupakan bantuan social berupa pemberian beras gratis untuk warga masyarakat kurang beruntung dan juga upaya mengatasi beban pengeluaran masyarakat miskin juga sekaligus bertujuan untuk menekan angka inflasi sebagai dampak adanya kenaikan harga beras pada jenis tertentu.



Gambar Penyaluran Bantuan Sosial Beras Sejahtera dan Rastrada

3. Gelar Pangan Murah

Dalam rangka penanganan inflasi, komoditas yang dilakukan intervensi adalah komoditas pangan yang termasuk **inflasi komponen bergejolak** atau **volatile food**. Inflasi yang termasuk ke dalam kategori inflasi non inti tersebut didefinisikan sebagai inflasi dipengaruhi oleh kejutan dalam kelompok bahan makanan seperti beras, jagung, dan lombok. Hal lain yang dilaksanakan adalah operasional Toko Tani Indonesia sebagai *fixed market* yang mana sasarannya adalah masyarakat berpenghasilan menengah ke atas. Tujuan pelaksanaannya adalah mendekatkan produsen/distributor/agen kepada konsumen akhir dengan cara mempersingkat rantai distribusi sehingga produsen/distributor/agen memperoleh nilai tambah (*value added*) berupa harga yang lebih tinggi dibanding dijual ke broker/tengkulak/pengepul/makelar sedangkan konsumen akhir mendapatkan barang kebutuhan pokok yang harganya di bawah harga pasar. Dengan adanya Gelar Pangan Murah, konsumen tidak perlu mengeluarkan biaya transportasi, tidak memerlukan waktu yang relative lebih lama jika berbelanja di pasar, tidak meninggalkan rumah artinya masih bisa melaksanakan pekerjaan produktif lainnya, dan lain-lain.



Gambar Pelaksanaan Stabilisasi Pasokan dan Harga Gelar Pangan Murah



Gambar Pelaksanaan GPM Penanganan Dampak Inflasi

Dalam rangka penanganan dampak inflasi, daerah menganggarkan belanja wajib perlindungan sosial untuk periode bulan Oktober sampai dengan bulan Desember 2022, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan melaksanakan Gelar Pangan Murah atau stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), kegiatan ini bertujuan mengatasi adanya kenaikan harga bahan pangan sehingga harga pangan masih tetap terjangkau oleh masyarakat.

Pelaksanaan di lapangan ditargetkan di 33 titik lokasi yang sudah ditentukan dengan berkoordinasi dengan Desa dan Kecamatan yang akan dilaksanakan Gelar Pangan Murah (GPM) penanganan inflasi yang tersebar di 11 Kecamatan

Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kegiatan GPM melayani masyarakat yang terdampak kenaikan harga BBM dengan prioritas Desa pinggiran dan relatif jauh dari pasar Kecamatan dan pasar Kabupaten.

Tabel Data Pelaksanaan Gelar Pangan Murah Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2022

No.	Desa	Kecamatan	Jumlah Warga/ Masyarakat Terlayani (Orang)	Jumlah Manfaat Selisih Harga (Rp)
1.	Taniran Selatan	Angkinang	86	1.239.600
2.	Longawang	Telaga Langsat	112	1.305.700
3.	Kapuh	Simpur	112	1.507.400
4.	Pahampangan	Padang Batung	121	1.123.000
5.	Habirau Tengah	Daha Selatan	100	1.182.500
6.	Sungai Paring	Kandangan	87	1.351.100
7.	Sungai Kali	Sungai Raya	92	1.182.400
8.	Malinau	Loksado	112	1.460.700
9.	Karang Bulan	Kalumpang	110	1.613.500
10.	Sarang Halang	Sungai Raya	99	1.574.400
11.	Gambah Dalam	Kandangan	89	1.610.800
12.	Taniran Kubah	Angkinang	97	1.721.000
13.	Hamak Utara	Telaga Langsat	120	1.737.800
14.	Gambah Dalam Barat	Kandangan	101	1.815.000
15.	Lumpangi	Loksado	123	1.632.100
16.	Sirih Hulu	Kalumpang	99	1.550.000
17.	Jambu Hulu	Padang Batung	123	1.671.000
18.	Pantai Ulin	Simpur	102	1.613.000
19.	Kayu Abang	Angkinang	92	1.492.000
20.	Bumi Berkat	Sungai Raya	117	1.681.200
21.	Banua Hanyar	Daha Selatan	126	1.898.400
22.	Bangkau	Kandangan	109	1.640.200
23.	Asam	Sungai Raya	87	1.377.000
24.	Tawia	Angkinang	73	1.138.500
25.	Pihanin Raya	Daha Selatan	128	2.127.500
26.	Sungai Raya Utara	Sungai Raya	105	1.469.400
27.	Tayub	Padang Batung	111	1.310.600
28.	Gumbil	Telaga Langsat	107	1.078.000
29.	Tambingkar	Kalumpang	100	1.224.400
30.	Bariang	Kandangan	103	1.208.600
31.	Bajayau dan sekitarnya	Daha Barat	120	1.697.000
32.	Lokbinuang	Telaga Langsat	105	1.131.000
33.	Tebing Tinggi	Simpur	100	968.600
	Jumlah		2.416	34.979.800

- Pelaksanaan Kegiatan Gelar Pangan Murah Penanganan Inflasi sampai dengan tanggal 16 Desember 2022 sudah mencapai target 33 lokasi. Biaya yang disediakan (pagu anggaran) Rp. 79.873.550,-
Dapat direalisasikan sampai dengan akhir Desember 2022 sejumlah = Rp. 52.034.750,- atau 65%, dengan realisasi fisik 100% sesuai dengan target kegiatan yang ditetapkan.
- Realisasi fisik pelaksanaan kegiatan Gelar Pangan Murah penanganan dampak inflasi 100 %

4. Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah

Penguatan cadangan pangan meliputi penguatan jalinan kerja sama dengan Perum Bulog dan pembangunan dan pemeliharaan, dan pembinaan Gapoktan pengelola Lumbung Pangan Masyarakat (LPM). Keberadaan LPM bertujuan meningkatkan pemberdayaan masyarakat miskin melalui padat karya dan penurunan stunting di wilayah rentan rawan pangan. Outcome kegiatan ini adalah sebanyak 400 orang anggota gabungan kelompok tani dapat melaksanakan proses tunda jual pada lumbung pangan masyarakat yang mana keuntungan dari selisih harganya dapat digunakan untuk menambah pendapatan anggota, disamping itu tersedia juga gabah sebanyak 2 (dua) ton sebagai *iron stock* yang dapat digunakan untuk penanggulangan kerawanan pangan khususnya beras di tingkat gabungan kelompok tani.

Beras Cadangan Pangan Pemerintah yang pengelolaannya dititip pada Perum Bulog Kantor Cabang Barabai menjadi bertambah sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perhitungan Cadangan Beras Pemerintah Daerah dan dapat digunakan untuk mengatasi kerawanan pangan khususnya beras di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Pada Tahun 2022 telah dilaksanakan Belanja Beras Cadangan Pangan Masyarakat sebanyak 57.666 (lima puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh enam) kilogram dan Belanja 31.877 (tiga puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh) kilogram Gabah dan 100 (seratus) lembar Karung Gabah untuk pengisian Lumbung Pangan Masyarakat yang dibangun

dari Dana DAK Fisik Penugasan Bidang Pertanian.

Pengadaan beras melalui perum Bulog sebanyak 50.000 kg x Rp 10.859 = Rp 542.950.000,- untuk mengisi Kembali beras cadangan yang dititipkan ke perum BULOG agar jumlah CPP daerah tetap memenuhi standar CPP Kabupaten 92,68 ton.



Gambar Pengadaan Gabah untuk Pengisian LPM



Gambar Pengadaan Beras Cadangan Pangan Pemerintah

5. Penguatan cadangan pangan di desa antara lain menyediakan Lumbung dan Infrastruktur dan sarana Pendukung

Berdasarkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, bahwa untuk menjaga kualitas cadangan pangan pemerintah Daerah Pada Lumbung Pangan Masyarakat dilakukan Pemeliharaan dan peremajaan gabah. Pada tahun 2022 telah terpeliharanya 10.000 Kg Gabah di Lumbung Pangan Masyarakat. Outcome kegiatan ini adalah terpeliharanya kualitas Gabah Cadangan Pangan Pemerintah yang dititip di Lumbung Masyarakat sehingga selalu siap untuk disalurkan untuk menanggulangi kerawanan pangan masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.



Gambar Pemeliharaan Gabah Cadangan Pangan Pemerintah

Pada tahun 2022 telah dilaksanakan penguatan lumbung melalui Gapoktan di Desa Wasah Tengah Kecamatan Simpur dan Desa Hamayung Utara Kecamatan Daha Utara, dengan rincian masing-masing:

- ✓ 1 (satu) unit Lumbung Pangan serta 1 (satu) unit Rumah Rice Milling Unit (RMU) dan Bed Dryer
- ✓ 1 (satu) unit Rice Milling Unit (RMU) dan 1 (satu) unit Bed Dryer untuk
- ✓ 1 (satu) unit Lantai Jemur Beton.

Outcome kegiatan ini adalah anggota gabungan kelompok tani dapat melaksanakan proses tunda jual pada lumbung pangan masyarakat yang mana keuntungan dari selisih harganya dapat digunakan untuk menambah pendapatan anggota, disamping itu tersedia juga gabah sebanyak 2 (dua) ton sebagai iron stock yang dapat digunakan untuk penanggulangan kerawanan pangan khususnya beras di tingkat gabungan kelompok tani. Mereka juga dapat mengeringkan gabahnya tanpa tergantung kepada cuaca terik dengan memakai dryer sehingga kadar air gabah dapat terjaga optimum dan dapat disimpan lebih lama. Gabah juga dapat mereka giling menjadi beras sehingga meningkatkan harga jual. Keuntungan dari penjualan gabah sebagian bisa digunakan untuk pemeliharaan Lumbung dan sarana yang ada.



Gambar Pembangunan Lumbung Pangan dan Lantai Jemur di desa Hamayung utara

6. Monitoring Ketersediaan, Pasokan, dan Harga Pangan dan Koordinasi Lintas SKPD dan Sektor

a. Monitoring Ketersediaan, Pasokan, dan Harga Pangan

Hasil monitoring stok dan harga gabah dan beras di penggilingan pada tahun 2022 disajikan dalam penjelasan dan analisis data berikut.

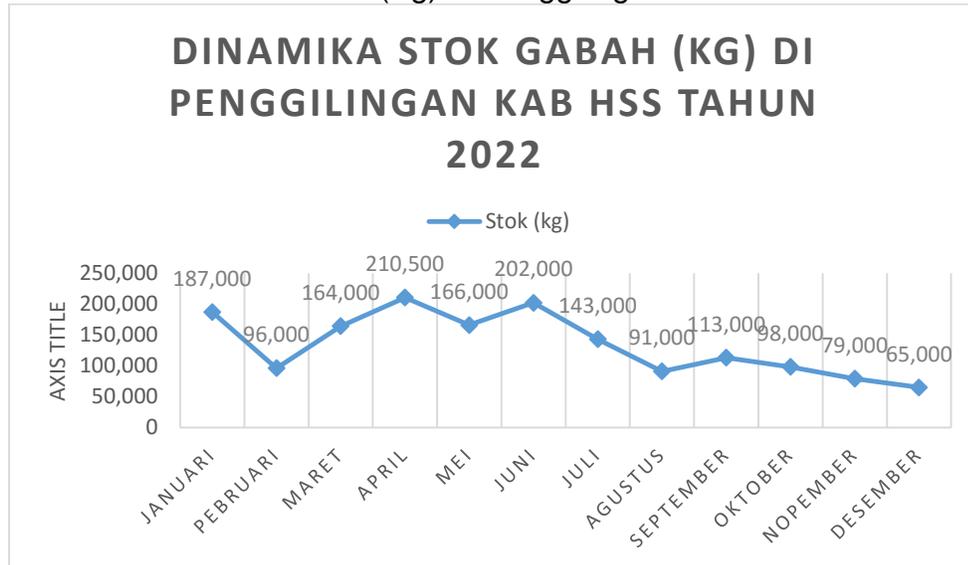
Tabel Perkembangan stok gabah di penggilingan tahun 2022

Bulan	Stok (kg)
Januari	187,000
Pebruari	96,000
Maret	164,000
April	210,500
Mei	166,000
Juni	202,000
Juli	143,000
Agustus	91,000
September	113,000
Oktober	98,000
Nopember	79,000
Desember	65,000

Sumber: Penggilingan sampel Januari-Desember 2022

Pada Tabel terlihat perkembangan harga beras di penggilingan pada tahun 2022. Pada awal tahun beras berada dikisaran Rp8.500-Rp10.000. Harga tersebut stabil hingga bulan Maret. Kemudian bulan April hingga Juni mengalami penurunan. Bulan Mei harga beras terendah Rp7.700 per kg. Pada bulan Agustus harga beras mengalami kenaikan menjadi Rp9.000-Rp12.500. Kenaikan tertinggi terjadi pada akhir tahun dimana harga beras mencapai kisarab Rp14.000-Rp17.000. Fluktuasi harga beras lebih jelasnya disajikan dalam Grafik berikut :

Grafik
Dinamika Stok Gabah (Kg) di Penggilingan Kab HSS Tahun 2022



Sumber: Penggilingan sampel Januari-Desember 2022

Dinamika Stok Gabah (kg) dan perkembangan harga gabah yang berfluktuasi berbanding lurus dengan harga beras yang turut berfluktuasi. Perkembangan harga beras di penggilingan disajikan dalam Tabel 3.5

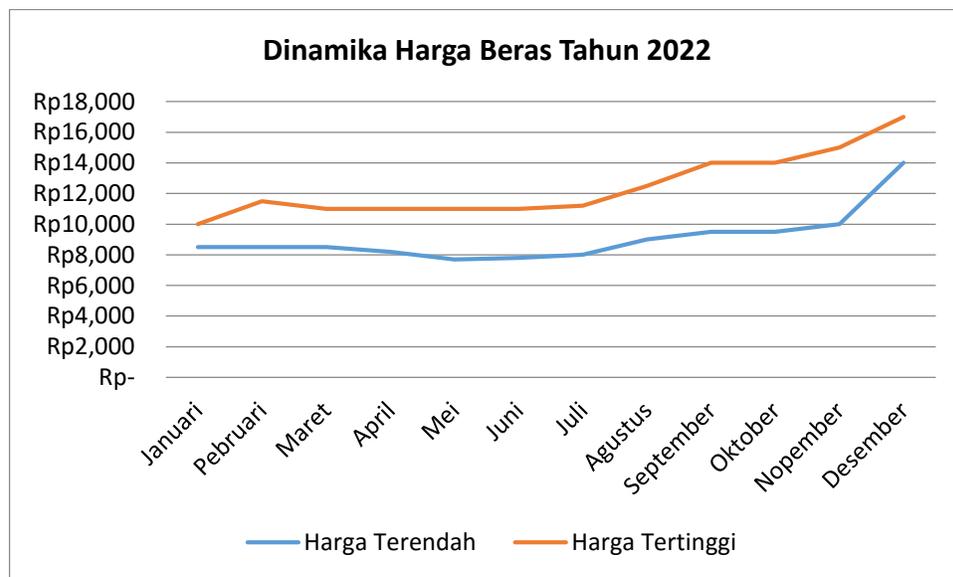
Tabel Perkembangan Harga Beras di Penggilingan
Sampel Tahun 2022

Bulan	Harga Terendah	Harga Tertinggi
Januari	Rp. 8,500	Rp. 10,000
Pebruari	Rp. 8,500	Rp. 11,500
Maret	Rp. 8,500	Rp. 11,000
April	Rp. 8,200	Rp. 11,000
Mei	Rp. 7,700	Rp. 11,000
Juni	Rp. 7,800	Rp. 11,000
Juli	Rp. 8,000	Rp. 11,200
Agustus	Rp. 9,000	Rp. 12,500
September	Rp. 9,500	Rp. 14,000
Oktober	Rp. 9,500	Rp. 14,000
Nopember	Rp. 10,000	Rp. 15,000
Desember	Rp. 14,000	Rp. 17,000

Sumber: Penggilingan sampel Januari-Desember 2022

Pada Tabel terlihat perkembangan harga beras di penggilingan pada tahun 2022. Pada awal tahun beras berada di kisaran harga Rp8.500-Rp10.000. Harga tersebut stabil hingga bulan Maret. Kemudian bulan April hingga Juni mengalami penurunan. Bulan Mei harga beras terendah Rp7.700 per kg. Pada bulan Agustus harga beras mengalami kenaikan menjadi Rp9.000-Rp12.500. Kenaikan tertinggi terjadi pada akhir tahun dimana harga beras mencapai kisaran Rp14.000-Rp17.000 sebanding dengan stok gabah yang mulai berkurang pada penggilingan. Fluktuasi harga beras lebih jelasnya disajikan dalam Grafik berikut.

Grafik
Perkembangan harga beras di penggilingan sampel tahun 2022



Sumber: Sumber: Penggilingan sampel Januari-Desember 2022

Outcome kegiatan Pemantau Stok, Pasokan dan Harga Pangan adalah tersedianya data serta analisa stok dan harga 11 (sebelas) bahan pokok untuk keperluan pimpinan dan *stakeholder* dalam rangka pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan yang akan diambil untuk mengatasi masalah ketersediaan dan kelangkaan bahan pangan serta inflasi di Kabupaten Hulu Sungai Selatan



Gambar Pemantau Stok, Pasokan dan Harga Pangan

b. Koordinasi, sinkronisasi penanganan inflasi daerah



Gambar Rapat Koordinasi Tim Penanganan Inflasi



**Koordinasi Pemantapan Pelaksanaan Inovasi Penanganan Inflasi Daerah
dengan PT Antang Gunung Meratus**

Terdapat Analisis PPH yaitu PPH Ketersediaan dan PPH Konsumsi, kedua analisis ini mempunyai manfaat yang berbeda dimana sedangkan analisis secara Spesifik kegunaan PPH ketersediaan adalah (1) instrumen untuk menilai jumlah dan komposisi menurut jenis pangan secara agregat. (2) Skor PPH yang dihasilkan akan digunakan sebagai indikator mutu gizi pangan dan keragaman konsumsi pangan pada tingkat ketersediaan. (3). Sebagai baseline data untuk menghitung proyeksi penyediaan pangan ideal untuk suatu wilayah.

Keberagaman ketesediaan pangan dibutuhkan untuk mengarahkan masyarakat untuk mengkonsumsi pangan yang beragam, karena secara alamiah masyarakat akan mengkonsumsi apa yang tersedia di lingkungan dan di pasaran. Pola Pangan Harapan merupakan suatu metode yang digunakan untuk menilai jumlah dan komposisi atau ketersediaan pangan.

PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN

Sasaran : Meningkatnya ketersediaan, keterjangkauan, konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman

Indikator : Persentase Rata-rata Cadangan Pangan Masyarakat

Kegiatan Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Sasaran : Meningkatnya ketersediaan, keterjangkauan, konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman

Indikator : Jumlah Cadangan Pangan Masyarakat Pada Lumbung

**Sub Kegiatan : Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan
Sub Kegiatan : Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur**

2022

- 1 (satu) unit Rice Milling Unit (RMU) dan 1 (satu) unit Bed Dryer untuk Gapoktan Papadaan Desa Wasah Tengah Kecamatan Simpuri
- 1 (satu) unit Lumbung Pangan serta 1 (satu) unit Lantai Jemur Beton untuk Gapoktan Papadaan Desa Wasah Tengah Kecamatan Simpuri.
- 1 (satu) unit Rice Milling Unit (RMU), 1 (satu) unit Bed Dryer 1 (satu) unit Lumbung Pangan serta 1 (satu) unit Lantai Jemur Beton untuk Gapoktan Ingin Maju Desa Hamayung Utara Kecamatan Daha Utara

Dengan dibangunnya 2 (dua) Lumbung pangan dan 2 (dua) lantai jemur anggota gabungan kelompok tani dapat melaksanakan proses tunda jual pada lumbung pangan masyarakat yang mana keuntungan dari selisih harganya dapat digunakan untuk menambah pendapatan anggota, disamping itu tersedia juga gabah sebanyak 2 (dua) ton sebagai *iron stock* yang dapat digunakan untuk penanggulangan kerawanan pangan khususnya beras ditingkat gabungan kelompok tani. Mereka juga dapat mengeringkan gabahnya tanpa tergantung kepada cuaca terik dengan memakai bed dryer dan Unit Rice Milling Unit (RMU) sehingga kadar air gabah dapat terjaga optimum dan dapat disimpan lebih lama. Gabah juga dapat mereka giling menjadi beras sehingga meningkatkan harga jual.



Sejak tahun 2008 sampai tahun 2022 telah terbangun sebanyak 24 Lumbung Pangan dan Lantai Jemur dengan aktivitas utamanya yaitu tunda jual padi dan beras. Berikut data lumbung pangan dan lantai jemur di Kabupaten Hulu Sungai Selatan :

**Laporan Kinerja Dinas Ketahanan Pangan
Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2022**

No.	Kecamatan	Desa	Nama Kelompok	Dana	Tahun Dibangun	Luas Lumbung (meter)	Tahun Pengisian Banper APBN/APBD	Kondisi Fisik Lumbung (baik/ sedang /rusak	sarana yang dimiliki (lantai jemur, dryer, RMU, lainnya*)	Ukuran Lantai Jemur (meter)	Stok Lumbung (ton)	Komoditas Gabah/ Beras	Jumlah Anggota (orang)
1	Angkinang	Telaga Sili-sili	Suka maju	APBD II	2009	7 x 8	2013/APBN	Rusak berat /tdk dimanfaatkan	-	tidak ada	0	Gabah	0
2	Daha Sel	Muning Baru	Muning karya Mandiri	DAK	2011	6 x 7	2013/APBN	Baik /dimanfaatkan	Lantai jemur + RMU	6x5	4,500	Gabah	30
3	Kalumpang	Baliamu	Baliamu Sejahtera	DAK	2010	6 x 7	2013/APBN	Baik /dimanfaatkan	Lantai jemur	6x5	3,000	Gabah	30
4	Simpur	Panjampang B	Pematang Gudam	DAK	2009	6 x 7	2013/APBN	Baik/dimanfaatkan	Lantai jemur + RMU	3x4	3,500	Gabah	30
5	Daha Sel	Muning Tengah	Besamaan	DAK	2009	5 x 6	2020/APBD I	Baik/dimanfaatkan	Lantai jemur	3x4	6,546	Gabah	30
6	Loksado	Ulang	Suka maju	DAK & DAU	2013	6 x 8	2015/APBN	Baik/dimanfaatkan	Lantai jemur + RMU	6x5	1,000	Gabah	30
7	Loksado	Loksado	Suka Damai	DAK & DAU	2013	6 x 8	2015/APBN	Baik/dimanfaatkan	Lantai jemur + RMU	6x5	1,500	Gabah	30
8	Daha Utara	Pasungkan	Karya Mandiri	DAK & DAU	2013	6 x 8	2015/APBN	Baik/dimanfaatkan	Lantai jemur	6x5	1,000	Gabah	30
9	Telaga Langsat	Mandala	Carnik Karya Usaha	DAK & DAU	2014	7 x 8	2015/APBN	Baik/dimanfaatkan	Lantai jemur	7x6	500	Gabah	30
10	Loksado	Lumpangi	Wana Makmur	APBD II	2017	7 x 8	2018/APBD I	Baik/dimanfaatkan	Lantai jemur	7x6	7,000	Gabah	30
11	Simpur	Simpur	Harapan Jaya	APBD II	2017	6 x 8	2018/APBD I	Baik/dimanfaatkan	Lantai jemur	6x5	6,500	Gabah	30

12	Kandangan	Lungau	Lumbang Lungau	DAK	2008	6 x 7	2010/APBD II	rusak sedang/tidak dimanfaatkan	-	6x5		Gabah	0
13	Sungai Raya	Asam	Al Barakah	DAK	2008	6 x 7	2010/APBD II	Baik/dimanfaatkan	Lantai jemur	6x5	5,000	Gabah	30
14	Sungai raya	Telaga Bidadari	Telaga Bidadari	DAK	2009	6 x 7	-	Baik/dimanfaatkan	-	tidak ada		Gabah	
15	Angkinang	Kayu abang	Bangun Banua	DAK	2009	6 x 7	-	rusak sedang/tidak dimanfaatkan	-	tidak ada	500	Gabah	
16	Angkinang	Bamban Selatan	Melati	APBD II/DID	2020	6 x 7	2020/APBD I	Baik/dimanfaatkan	-	tidak ada	5,500	Gabah	30
17	Padang Batung	Tabihi	Serumpun	DAK	2009	6 x 7	2010/APBD II	Baik/dimanfaatkan	Lantai jemur kecil	6x5	5,405	Gabah	30
18	Kalumpang	Bago tanggul	Bago Tanggul	DAK	2009	6 x 7	2010/APBD II	Rusak	Lantai Jemur	tidak ada	-	Gabah	0
19	Daha Barat	Bajayau Lama	Berkah Bersama	DAK	2019	8 x 10	2022/APBD II	Baik/dimanfaatkan	Lantai jemur	8x8	7,000	Gabah	30
20	Padang Batung	Batu Laki	Berkat Sentosa	APBD II	2019	6 x 7	2022/APBD II	Baik/dimanfaatkan	Lantai jemur	6x5	4,626	Gabah	30
21	Sungai Raya	Karasikan	Maju Bersama	DAK	2021	10 x 10	2022/APBD I	Baik/dimanfaatkan	Lantai jemur + RMU	10x10	6,000	Gabah	100
22	Daha Utara	Murung Raya	Bumi Raya	APBD Kab.HSS	2021	6 x 8	2022/APBD II	Baik/dimanfaatkan	Lantai Jemur	6x5	4,625	Gabah	30
23	Simpur	Wasah Tengah	Papadaan	DAK	2022	10 x 10	2022/APBD II	Baik/dimanfaatkan	Lantai Jemur + Rumah Rmu dan RMU + Bedryer	10x10	6,000	Gabah	100
24	Daha Utara	Hamayung Utara	Ingin Maju	DAK	2022	10 x 10	2022/APBD II	Baik/dimanfaatkan	Lantai Jemur + Rumah Rmu dan RMU + Bedryer	10x10	6,000	Gabah	100

Tabel Efisiensi Anggaran Indikator Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan

No	Program	Capaian Kinerja	Realisasi Anggaran	Efisiensi	Kegiatan	Capaian Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)	Efisiensi	Sub Kegiatan	Capaian Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)	Efisiensi
1.	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan kemandirian Pangan	100	99.98	1.00	Penyediaan Insfrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	100	99.98	1.0	Penyediaan Insfrastruktur Lumbung Pangan	100	100	1.0
									Penyediaan Insfrastruktur Lantai Jemur	100	100	1.0

Sumber : Data diolah tahun 2022

Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan
Indikator Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan

NO	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2023		Target Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2022		Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2022		Capaian
1	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	112	%	112	%	112	%	100 %
		87.17	Skor	87.17	Skor	87.17	Skor	100 %
2	Kegiatan Penyediaan Insfrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	63,087	Kg	63,087	Kg	63,087	Kg	100 %
3	Sub Kegiatan Penyediaan Insfrastruktur Lumbung Pangan	2	Unit	2	Unit	2	Unit	100 %
4	Sub Kegiatan Penyediaan Infratraktur Lantai Jemur	2	Unit	2	Unit	2	Unit	100 %

1. Meningkatkan Kemampuan Pemenuhan Kebutuhan Pangan Daerah

1.1. Skor PPH Ketersediaan



Dalam sasaran kinerja meningkatkan kemampuan pemenuhan kebutuhan pangan daerah pada tahun 2022 diperoleh hasil 100.42% capaian kinerja dengan serapan anggaran sebesar Rp. 3.222.122.944 dari alokasi anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. Rp. 3.340.531.350 atau sebesar 96,46% sehingga di peroleh efisiensi anggaran dalam pencapaian kinerja sebesar 1,04.

2.09.02. PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN

1.1. Persentase Rata - Rata Cadangan Pangan Masyarakat



Dalam sasaran kinerja pada Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan yaitu untuk memastikan cadangan pangan masyarakat aman pada tahun 2022 diperoleh hasil 100% capaian kinerja dengan serapan sebesar Rp. 2.174.574.000 dari alokasi anggaran Rp. 2.175.000.000 atau sebesar 99,98% sehingga diperoleh efisiensi sebesar 1,002.

PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT

Sasaran : Meningkatnya ketersediaan, keterjangkauan, konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman

Indikator : Persentase Cadangan Pangan Pemerintah

Kegiatan Penyediaan Dan Penyaluran Pangan Pokok Atau Pangan Lainnya Sesuai Dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Stabilitasi Pasokan Dan Harga Pangan

Sasaran : Meningkatnya ketersediaan, keterjangkauan, konsumsi pangan

Indikator : Jumlah laporan pencatatan harga 11 pangan pokok

Sub Kegiatan : Pemantau stok, pasokan, dan harga pangan

Sub Kegiatan : pengembangan kelembagaan usaha pangan masyarakat dan toko tani indonesia

2022

- Pelaksanaan Gelar Pangan Murah Toko Tani Indonesia di laksanakan sebanyak 33 kali mulai januari sampai dengan September 2022 dan Oktober sampai dengan Desember di laksanakan 33 kali Gelar Pangan Murah untuk penanganan dampak inflasi di 11 kecamatan desa pinggiran.

- kegiatan Pemantau Stok, Pasokan dan Harga Pangan memantau tersedianya data serta analisa stok dan harga 11 (sebelas) bahan pokok untuk keperluan pimpinan dan *stakeholder* dalam rangka pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan yang akan diambil untuk mengatasi masalah ketersediaan dan kelangkaan bahan pangan serta inflasi di Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Tabel Efisiensi Anggaran Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan

No	Program	Capaian Kinerja	Realisasi Anggaran	Efisiensi	Kegiatan	Capaian Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)	Efisiensi	Sub Kegiatan	Capaian Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)	Efisiensi
1.	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	100	73,14	1.36	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	100	81.69	1.22	Pemantau Stok, Pasokan dan Harga Pangan	100	99.94	1.0
									Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	100	71,13	1.40

Tabel Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2022

NO	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2023		Target Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2022		Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2022		Capaian
1	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	82,37	%	82,37	%	82,37	%	100 %
2	Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	1.460	Lap	1.460	Lap	1.460	Lap	100 %
3	Sub Kegiatan Pemantau Stok, Pasokan dan Harga Pangan	12	Dok	12	Dok	12	Dok	100 %
4	Sub Kegiatan Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	2	Unit	2	Unit	2	Unit	100 %

2.09.03. PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT

2.1. Persentase Cadangan Pangan Pemerintah Daerah



Dalam sasaran kinerja pada Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Masyarakat yaitu untuk memastikan cadangan pangan pemerintah daerah untuk masyarakat aman pada tahun 2022 diperoleh hasil 100% capaian kinerja dengan serapan sebesar Rp. 1.047.548.944 dari alokasi anggaran Rp. 1.165.531.350 atau sebesar,88% sehingga diperoleh efisiensi sebesar 1,112

2. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi

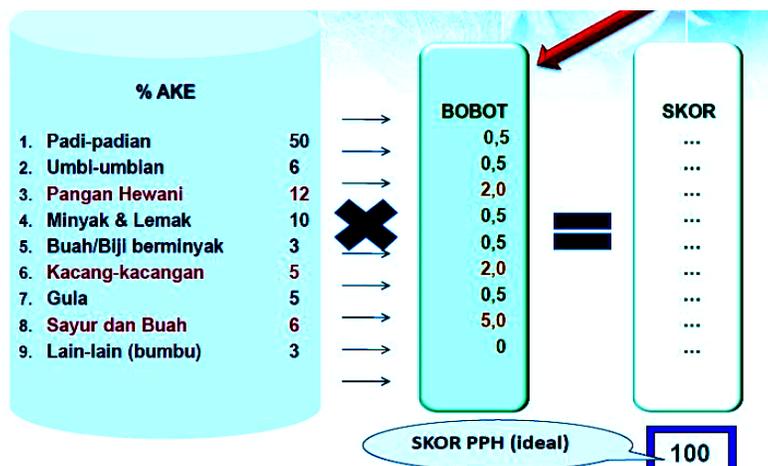
Skor Pola Pangan Harapan (PPH) menggambarkan keanekaragaman/ keseimbangan konsumsi masyarakat terhadap Sembilan kelompok bahan pangan (padi-padian, umbi-umbian, pangan hewani, minyak dan lemak, buah/ biji berminyak, kacang-kacangan, gula, sayur dan buah, lain-lain). Untuk meningkatkan Skor Pola Pangan Harapan Ketersediaan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, tahun 2022 ditargetkan sebesar 85,32 dan realisasi Skor Pola Konsumsi sebesar 90 yang berarti melebihi target yang ditentukan. Hal ini dimaksudkan untuk mengukur tingkat keberagaman dan keseimbangan konsumsi pangan masyarakat. Semakin tinggi skor PPH konsumsi maka pangan semakin beragam dan seimbang. Metode Perhitungan Pola Pangan Harapan (PPH), sebagai berikut:

Pengumpulan data konsumsi pangan bertujuan untuk memperoleh informasi tentang jenis dan jumlah pangan yang dikonsumsi oleh individu maupun keluarga, termasuk bagaimana kebiasaan makannya. Data konsumsi pangan ini digunakan

untuk menentukan jumlah dan sumber zat gizi yang dikonsumsi oleh individu atau keluarga. Penentuan sampel responden dipilih 29 (Dua puluh sembilan) desa dan termasuk 5 Desa KRPL yaitu Desa Panjampang Bahagia dan Amparaya dari Kecamatan Simpur, Desa Sungai Raya Selatan dan Telaga Bidadari dari Kecamatan Sungai Raya dan Desa Malutu dari Kecamatan Padang Batung, dari 11 Kecamatan yang mewakili karakteristik yang bersangkutan dan mudah dijangkau. Penentuan desa dan rumah tangga dilakukan oleh aparat kabupaten. Setiap desa dipilih 10 sampel rumah tangga. Responden adalah ibu / anggota rumah tangga yang berperan dalam penentuan konsumsi pangan rumah tangga serta bertanggung jawab dalam pencatatan konsumsi pangan seluruh anggota rumah tangga.

Pengumpulan data konsumsi pangan ini dilakukan dengan cara survei dengan metode mengingat-ingat (food recall method). Pada prinsipnya metode pengumpulan data konsumsi ini dilakukan dengan cara mencatat jenis dan jumlah bahan makanan yang dikonsumsi pada masa 24 jam yang lalu melalui wawancara. Penafsiran jumlah pangan yang dikonsumsi adalah dalam bentuk Ukuran Rumah Tangga (URT) kemudian dikonversi ke satuan berat (gram). Konversi dari URT ke gram menggunakan Daftar Konversi Berat Mentah Masak (DMM) Daftar konversi Berat Penyerapan Minyak (DPM).

Pengelompokan Pangan Berdasarkan PPH Pengelompokan pangan yang dipakai pada Analisis ini adalah berdasarkan Daftar Komposisi Bahan Makanan (DKBM) sebagai berikut :



Hasil perhitungan survey Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi Kabupaten Hulu Sungai Selatan Berdasarkan rata – rata penghasilan 300.000, 500.000, 750.000, 1.000.000 dan 1.500.000 dalam tabel dibawah sebagai berikut:

Tabel 3.9 Perhitungan Survey Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi Berdasarkan Tingkat Penghasilan Kabupaten Hulu Sungai Selatan

DINAS KETAHANAN PANGAN KAB HULU SUNGAI SELATAN
HULU SUNGAI SELATAN
JALAN KAMBOJA HULU SUNGAI SELATAN

SKOR POLAPANGAN HARAPAN KONSUMSI PANGAN PENDUDUK
BERDASARKAN DATA SURVEY SOSIAL EKONOMI NASIONAL
HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2022

300.000

No	Kelompok Pangan	Berat Pangan Gram /Kapita/Hari	Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH)							
			Kkal/Kapita	%	% AKE*	Bobot	Skor Aktual	Skor AKE	Skor Maks	Skor PPH
1	Padi-padian	319,7	1.317	55,8	62,7	0,5	27,9	31,4	25,0	25,0
2	Umbi-umbian	26,3	32	1,3	1,5	0,5	0,7	0,8	2,5	0,8
3	Pangan Hewani	170,9	309	13,1	14,7	2,0	26,2	29,5	24,0	24,0
4	Minyak dan Lemak	25,0	225	9,5	10,7	0,5	4,8	5,4	5,0	5,0
5	Buah/Biji Berminyak	3,2	17	0,7	0,8	0,5	0,4	0,4	1,0	0,4
6	Kacang-kacangan	18,0	53	2,2	2,5	2,0	4,5	5,0	10,0	5,0
7	Gula	33,8	125	5,3	6,0	0,5	2,7	3,0	2,5	2,5
8	Sayur dan Buah	158,2	109	4,6	5,2	5,0	23,1	26,0	30,0	26,0
9	Lain-lain	224,7	173	7,3	8,3	-	-	-	-	-
Total			2.361	100,0	112,4		90,1	101,3	100,0	88,7

500.000,0

No	Kelompok Pangan	Berat Pangan Gram /Kapita/Hari	Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH)							
			Kkal	%	% AKE*	Bobot	Skor Aktual	Skor AKE	Skor Maks	Skor PPH
1	Padi-padian	302,5	1.228	58,9	58,5	0,5	29,4	29,2	25,0	25,0
2	Umbi-umbian	20,9	26	1,2	1,2	0,5	0,6	0,6	2,5	0,6
3	Pangan Hewani	137,6	237	11,4	11,3	2,0	22,8	22,6	24,0	22,6
4	Minyak dan Lemak	22,1	200	9,6	9,5	0,5	4,8	4,8	5,0	4,8
5	Buah/Biji Berminyak	1,7	9	0,4	0,4	0,5	0,2	0,2	1,0	0,2
6	Kacang-kacangan	15,6	46	2,2	2,2	2,0	4,4	4,4	10,0	4,4
7	Gula	26,4	96	4,6	4,6	0,5	2,3	2,3	2,5	2,3
8	Sayur dan Buah	115,4	77	3,7	3,7	5,0	18,5	18,4	30,0	18,4
9	Lain-lain	219,0	166	8,0	7,9	-	-	-	-	-
Total			2.085	100,0	99,3		83,0	82,5	100,0	78,2

1.000.000,0

No	Kelompok Pangan	Berat Pangan Gram/Kapita/Hari	Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH)							
			Kkal	%	% AKE*)	Bobot	Skor Aktual	Skor AKE	Skor Maks	Skor PPH
1	Padi-padian	328,5	1.370	52,5	65,2	0,5	26,2	32,6	25,0	25,0
2	Umbi-umbian	27,7	33	1,3	1,6	0,5	0,6	0,8	2,5	0,8
3	Pangan Hewani	212,4	394	15,1	18,8	2,0	30,2	37,6	24,0	24,0
4	Minyak dan Lemak	34,2	300	11,5	14,3	0,5	5,7	7,1	5,0	5,0
5	Buah/Biji Berminyak	0,5	3	0,1	0,1	0,5	0,1	0,1	1,0	0,1
6	Kacang-kacangan	21,9	68	2,6	3,2	2,0	5,2	6,5	10,0	6,5
7	Gula	32,1	117	4,5	5,6	0,5	2,2	2,8	2,5	2,5
8	Sayur dan Buah	209,6	170	6,5	8,1	5,0	32,5	40,4	30,0	30,0
9	Lain-lain	288,2	156	6,0	7,4	-	-	-	-	-
	Total		2.611	100,0	124,3		102,8	127,8	100,0	93,8

1.500.000,0

No	Kelompok Pangan	Berat Pangan Gram/Kapita/Hari	Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH)							
			Kkal	%	% AKE*)	Bobot	Skor Aktual	Skor AKE	Skor Maks	Skor PPH
1	Padi-padian	315,9	1.315,940	54,1	62,6	0,5	27,1	31,3	25,0	25,0
2	Umbi-umbian	26,6	31,920	1,3	1,5	0,5	0,7	0,8	2,5	0,8
3	Pangan Hewani	189,2	324,171	13,3	15,4	2,0	26,7	30,9	24,0	24,0
4	Minyak dan Lemak	34,0	298,779	12,3	14,2	0,5	6,1	7,1	5,0	5,0
5	Buah/Biji Berminyak	0,4	2,659	0,1	0,1	0,5	0,1	0,1	1,0	0,1
6	Kacang-kacangan	18,0	52,914	2,2	2,5	2,0	4,4	5,0	10,0	5,0
7	Gula	33,8	125,293	5,2	6,0	0,5	2,6	3,0	2,5	2,5
8	Sayur dan Buah	163,1	124,282	5,1	5,9	5,0	25,6	29,6	30,0	29,6
9	Lain-lain	270,5	155,577	6,4	7,4	-	-	-	-	-
	Total		2.431,134	100,0	115,8		93,1	107,7	100,0	92,0

Keterangan = *) Angka Kecukupan Energi

2.100,0 Kkal/Kapita/Hari

Tabel Skor PPH Konsumsi Berdasarkan tingkat Pendapatan

No	Pendapatan	Skor PPH
1	300.000	88.7
2	500.000	88.8
3	750.000	89.8
4	1.000.000	93.8
5	1.500.000	92.0
Rata-rata Skor PPH 2022		90.0

Sumber : Data Diolah tahun 2022

Pada tabel dapat dilihat bahwa rata – rata Skor PPH Konsumsi berdasarkan tingkat pendapatan mendapatkan skor 90,00 sehingga melebihi target. Berdasarkan karakteristik wilayah, Kabupaten Hulu Sungai Selatan memiliki banyak peluang dalam mengembangkan konsumsi pangan wilayah karena banyaknya jenis bahan pangan lokal baik yang mengandung Karbohidrat (Ubi nagara, ikur-ikur, singkong dan jagung) maupun yang berasal dari pangan hewani (Teranak unggas dan ikan air

tawar), namun melalui berbagai kegiatan yang dilaksanakan khususnya pada Satuan Kerja Dinas Ketahanan Pangan diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperbaiki konsumsi pangan masyarakat sampai tingkat rumah tangga baik mutu maupun jumlahnya.

Pengembangan keanekaragaman pangan dari sisi konsumsi masyarakat Hulu Sungai Selatan mengalami peningkatan. Hal itu antara lain tercermin dari meningkatnya skor Pola Pangan Harapan (PPH) Hulu Sungai Selatan pada tahun pada 2018 yaitu 81,8 menjadi 85,9 pada 2019 dan sekarang pada tahun 2022 telah mencapai 90. PPH adalah susunan keragaman pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama pada tingkat ketersediaan maupun konsumsi pangan. PPH merupakan instrumen untuk menilai situasi konsumsi pangan wilayah yang dapat digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan konsumsi pangan ke depan, dengan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, budaya dan preferensi konsumsi pangan masyarakat. Dengan kata lain, PPH merupakan instrumen sederhana untuk menilai situasi konsumsi pangan penduduk, baik jumlah maupun komposisi pangan menurut jenis pangan yang dinyatakan dalam skor. Semakin tinggi skor PPH, konsumsi pangan semakin beragam dan bergizi seimbang (maksimal 100). Berikut perkembangan capaian skor PPH Konsumsi tahun 2018 – 2022 tergambar pada tabel dan grafik berikut ini:

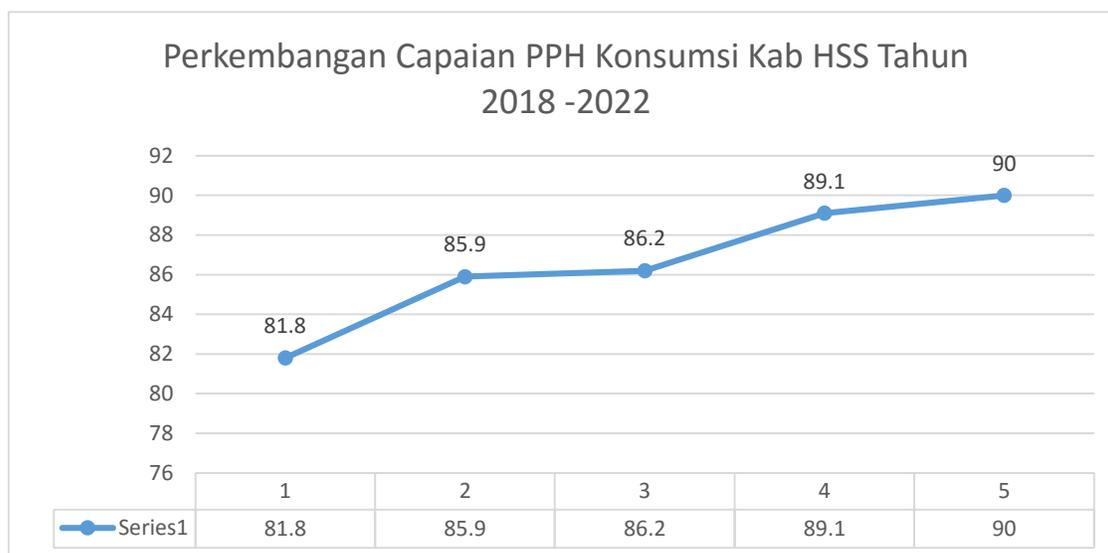
Tabel Perkembangan Capaian PPH Konsumsi Kab. HSS Tahun 2018-2022

No	Tahun	PPH
1	2018	81.8
2	2019	85.9
3	2020	86.2
4	2021	89.1
5	2022	90.0

Sumber : Data Diolah Tahun 2022

Dilihat dari tabel bahwa perkembangan capaian PPH Konsumsi dari tahun 2018-2022 mengalami peningkatan secara positif seperti terlihat pada grafik 3.1 berikut :

Grafik
Perkembangan Capaian PPH Konsumsi Kab. HSS Tahun 2018-2022



Skor Pola Pangan Harapan Jika dibandingkan dengan Kabupaten lain dan Provinsi dapat dilihat pada tabel berikut :

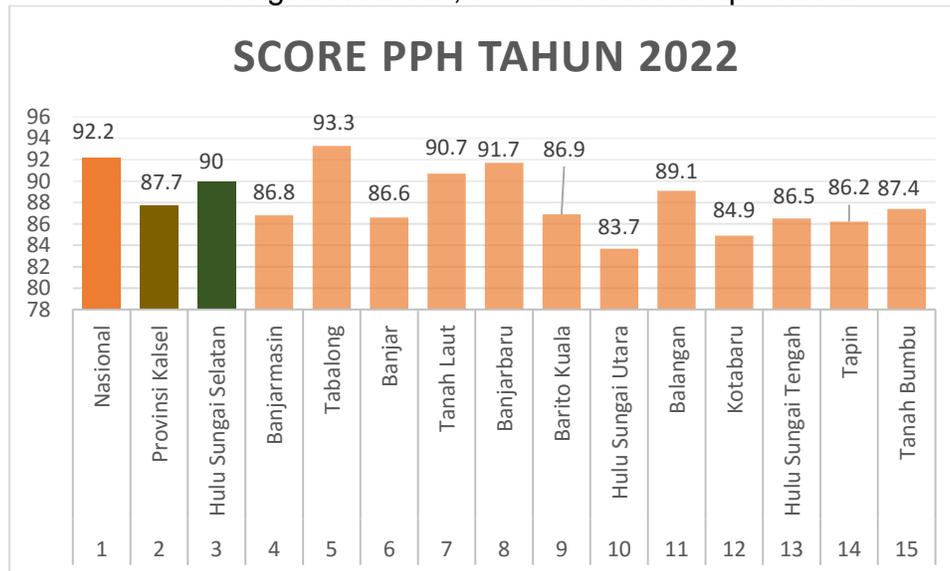
Tabel Perbandingan Skor PPH Konsumsi Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan Nasional, Provinsi dan Kabupaten lain

No	Kab/Kota	Skor PPH	
		2021	2022
1.	Nasional	87.2	92.2
2.	Provinsi Kalsel	84.5	87.7
3.	Hulu Sungai Selatan	89.1	90,0
4.	Banjarasin	83.3	86.8
5.	Tabalong	91.8	93.3
6.	Banjar	80.2	86.6
7.	Tanah Laut	82.8	90.7
8.	Banjarbaru	87.1	91.7
9.	Barito Kuala	83.5	86.9
10.	Hulu Sungai Utara	78.5	83.7
11.	Balangan	86.5	89.1
12.	Kotabaru	83.8	84.9
13.	Hulu Sungai Tengah	85.3	86.5

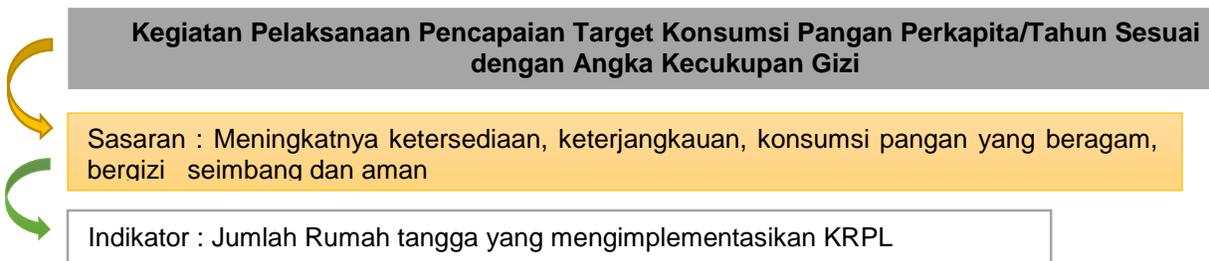
14.	Tapin	88.4	86.2
15.	Tanah Bumbu	85.2	87.4

Sumber : Data Diolah Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalsel

Grafik Perbandingan Skor PPH Konsumsi Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan Nasional, Provinsi dan Kabupaten lain



Berdasarkan tabel dan grafik di atas terlihat perbandingan skor PPH Konsumsi Nasional di bandingkan dengan provinsi dan kabupaten/kota lain di Provinsi Kalimantan Selatan. Skor PPH Konsumsi Kabupaten Hulu Sungai Selatan tidak lebih rendah dari Provinsi Kalimantan Selatan namun masih di bawah dari Skor PPH Nasional yang menunjukkan skor 92.2. Kualitas konsumsi pangan penduduk di tingkat wilayah (makro) ini dicerminkan dengan skor Pola Pangan Harapan (PPH). Sedangkan di tingkat keluarga dan individu, asupan makanan sesuai prinsip konsumsi pangan B2SA untuk memenuhi kebutuhan zat gizi dapat diketahui dengan melakukan penilaian konsumsi pangan, melalui pendekatan penghitungan porsi. Oleh sebab itu, skor PPH telah menjadi indikator yang cukup strategis dan merupakan indikator kinerja di bidang ketahanan pangan. Pentingnya pencapaian skor PPH tersebut juga diamanatkan oleh Undang-Undang (UU) Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi.



Kabupaten Hulu Sungai Selatan khususnya satuan kerja Dinas Ketahanan pangan pada tahun 2022 dalam rangka mendukung perbaikan konsumsi pangan wilayah melaksanakan kegiatan yang dibebankan baik melalui anggaran APBD II dan APBN TA 2022 berupaya kegiatan pelatihan pembuatan media tanaman P2WKSS dan Penyuluhan Gizi Desa P2WKSS didesa Muning Baru Kecamatan Daha Selatan. Lomba cipta menu di Kabupaten dan Tingkat Provinsi dan menjadi juara 3 (Tiga) Penyuluhan di Desa KRPL, Penyuluhan B2SA Mutu Keamanan Pangan dan sekolah dan Praktek P2SA pengolahan makanan non beras. Melalui kegiatan-kegiatan tersebut diharapkan masyarakat/kelompok sasaran meningkat pengetahuannya akan konnsumsi pangan yang bergizi, beragam dan aman serta dapat menerapkan pengatahuan tersebut dikeluarga masing-masing. Jumlah Binaan Kelompok Wanita Tani (KWT) Dinas Ketahanan Pangan sampai dengan tahun 2022 adalah sebanyak 61 kelompok, dengan tahap pengembangan sebanyak 5 kelompok pada tahun 2022 yang terdiri dari :

Tabel Data Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)
Kabupaten HSS Tahun 2022

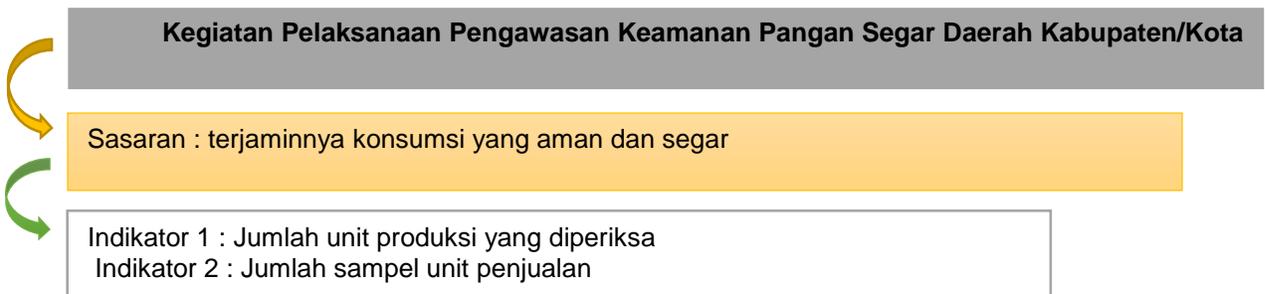
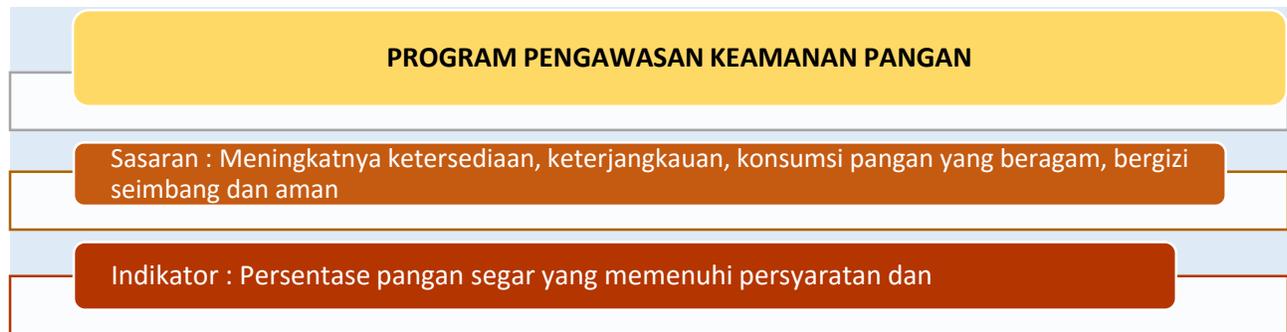
Nama KRPL	Desa/Kel	Jumlah Anggota	Kecamatan	Tahun
Janar Putih	Telaga Bidadari	30	Sungai Raya	2022
Bunga Anggrek	Karang Jawa	30	Padang Batung	2022
Longa Manis	Longawang	30	Telaga Langsung	2022
Banua Kambang	Wasah Hulu	30	Simpur	2022
Mutiara Harapan	Tawia	30	Angkinang	2022

Pada Tahun 2022 dalam rangka untuk mempercepat pelaksanaan pengendalian dampak inflasi karena kenaikan harga BBM di Hulu Sungai Selatan Dinas Ketahanan Pangan menjalankan program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat sebagai salah satu pendukung skor Pola Pangan Harapan Konsumsi. Kegiatan ini berupa pembagian bantuan benih terong, benih tomat, benih cabe rawit, polybag, pupuk NPK dan pupuk organik. Jumlah penerima manfaat bantuan adalah sebanyak 148 kepala rumah tangga pada 10 Kecamatan di Hulu Sungai Selatan.



pembagian benih cabe, terong, tomat, polybag, pupuk npk dan pupuk organik desa tabihi kecamatan padang batung

Monitoring pelaksanaan penanaman hasil pembagian



Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah kabupaten/Kota dengan sub kegiatan Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten Kota. Adapun tujuannya yaitu sebagai upaya terpenuhinya pangan segar yang bebas dari kontaminasi oleh bahan mikrobiologis, pestisida dan logam berat yang membahayakan kesehatan, melakukan pengujian pangan segar serta menyiapkan informasi tentang kondisi keamanan pangan segar di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Untuk meningkatkan mutu dan keamanan pangan telah dilakukan penyuluhan/sosialisasi tentang keamanan pangan serta melakukan pengawasan melalui pemeriksaan laboratorium terhadap pangan segar. Untuk tahun 2022 target indikator terjaminnya keamanan pangan segar sebesar 100% artinya tidak boleh ada cemaran dalam pangan segar. Dalam kegiatan keamanan pangan sangat diperlukan adanya beberapa cara/metode untuk pengawasan dan pemeriksaannya, agar dihasilkan pangan segar yang aman dan layak untuk di konsumsi. Pangan segar yang aman dan layak untuk dikonsumsi adalah pangan yang bebas dari berbagai cemaran, baik itu cemaran secara fisik, zat kimia berbahaya, cemaran

mikroba dan cemaran residu antibiotic, residu hormone, residu pestisida dan juga logam berbahaya (logam berat).

Pengujian dapat dilakukan melalui pemeriksaan laboratorium dan dengan menggunakan rapid test kit. Untuk Mengetahui adanya cemaran pada produk pangan segar maka perlu dilakukan pemeriksaan, baik secara Organoleptik (untuk pemeriksaan fisik Ph, suhu, dan adanya pembusukan/kualitas produk), pemeriksaan cepat dengan menggunakan screening tes antara lain untuk pemeriksaan zat pengawet (formalin borak dll), pemutih (klorin, hydrogen peroksida/H₂O₂) dan pemeriksaan laboratorium untuk memeriksa cemaran mikroba, residu antibiotic, residu hormone, residu pestisida dan logam berat. Keamanan pangan menjadi isu penting dalam perdagangan bebas. Jaminan keamanan pangan merupakan syarat dalam memenangkan persaingan di pasar bebas. Indikator ini penting karena indikator ini mendukung Penyelenggaraan SPM Ketahanan Pangan.



Pengambilan sampel pangan segar asal tumbuhan untuk pengujian pangan segar



Pengujian Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan

Efisiensi Anggaran Indikator Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi

No	Program	Capaian Kinerja	Realisasi Anggaran	Efisiensi	Kegiatan	Capaian Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)	Efisiensi	Sub Kegiatan	Capaian Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)	Efisiensi
1.	Program Pengawasan Keamanan Pangan	100	99.36	1.006	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	100	99.36	1.006	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	100	98	1.0
									Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	100	100	1.0
									Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	100	100	1.0
									Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	100	100	1.0

Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan
Indikator Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN TAHUN 2023		TARGET PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN TAHUN 2022		REALISASI PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN TAHUN 2022		CAPAIAN
1	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	100	%	100	%	100	%	100 %
2	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	33	Unit	33	Unit	33	Unit	100 %
		14	Pasar	14	Pasar	14	Pasar	100 %
3	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	1	Dok	1	Dok	1	Dok	100 %
4	Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	1	Dok	1	Dok	1	Dok	100 %
5	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	1	Dok	1	Dok	1	Dok	100 %
6	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	1	Dok	1	Dok	1	Dok	

2.09.05. PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN

4.1. Persentase pangan segar yang memenuhi persyaratan dan keamanan



Dalam sasaran kinerja pada Program Pengawasan Keamanan Pangan yaitu untuk memastikan pangan segar dan aman di Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun 2022 diperoleh hasil 100% capaian kinerja dengan serapan sebesar Rp. 30.194.900 dari alokasi anggaran Rp. 30.389.900 atau sebesar,88% sehingga diperoleh efisiensi sebesar 1,006.

Pada tahun 2022 capaian indikator terjaminnya keamanan pangan segar dengan target 80 dan realisasinya 82, atau bisa dinyatakan tingkat capaian kinerja sebesar 108,3%. Dimana dalam hasil pengujian masih ditemukan zat-zat kimia yang berbahaya pada pangan segar yang beredar di Kabupaten Hulu Sungai Selatan sekitar 18 % atau 4 kecamatan berdasarkan hasil sampel. Perhitungan ini berbeda dengan indikator yang lain, semakin sedikit terjadinya kasus pencemaran pangan segar maka kinerjanya semakin baik. Oleh karena perhitungannya berbeda dengan indikator yang lain, seperti halnya indikator kasus penyakit zoonosa, maka perhitungan untuk indikator ini juga dipisahkan dengan perhitungan yang lain Pangan yang tersedia aman dikonsumsi berarti bebas dari bahan kimia, mikroba, dan zat-zat lainnya yang merugikan kesehatan masyarakat dan memenuhi persyaratan halal.

B. REALISASI ANGGARAN

Dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta kinerja yang ingin dicapai Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan melaksanakan program dan kegiatan yang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Tahun Anggaran 2022 dengan jumlah anggaran Rp7.719.406.166,00,- dan telah direalisasi sebesar Rp. **Rp. 6,754,255,414** atau sebesar **87,50 %**.

Tabel 3.13 Realisasi Anggaran
Dinas Ketahanan Pangan Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2022

PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Anggaran	Realisasi (Rp.)	Realisasi (%)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 3.432.288.716	Rp. 2.650.774.088	77.23 %
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 7.599.900	Rp. 7.596.900	99.96%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp. 6.399.900	Rp. 6.398.100	99,97%
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 1.200.000	Rp. 1.198.800	100%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 3.035.220.416	Rp. 2.272.562.836	74.87%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp. 3.031.220.616	Rp. 2.268.563.036	74.87%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Rp. 1.599.800	Rp. 1.599.800	100%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Rp. 1.200.000	Rp. 1.200.000	100%
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi	Rp. 1.200.000	Rp. 1.200.000	100%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 204.807.400	Rp. 200.947.342	98,12%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Rp. 3.127.500	Rp. 3.127.500	100%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 32.176.900	Rp. 30.410.300	94,51%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp. 51.335.000	Rp. 50.037.500	97%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp. 25.890.000	Rp. 25.869.500	99,92%
Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Rp. 3.600.000	Rp. 2.960.000	82,22%

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 88.678.000	Rp. 88.542.542	99,85%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 7.935.000	Rp. 6.144.000	77,43%
Pengadaan Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp. 7.935.000	Rp. 6.144.000	77,43%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 94.676.000	Rp. 85.710.210	90,53%
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp. 500.000	Rp. 269.625	53,93%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 31.644.000	Rp. 25.585.585	80,85%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp. 62.532.000	Rp. 59.855.000	95,72%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 82.050.000	Rp. 77.812.800	94,84%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp. 50.350.000	Rp. 46.760.300	92,87%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp. 21.000.000	Rp. 20.967.500	99,85%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp. 10.700.000	Rp. 10.085.000	94%
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Rp. 2.175.000.000	Rp. 2.174.574.000	99,98%
Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 2.175.000.000	Rp. 2.174.574.000	99,98%
Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Rp. 1.883.800.000	Rp. 1.883.780.000	100%
Penyediaan Infratraktur Lantai Jemur	Rp. 291.200.000	Rp. 290.794.000	99,86%
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Rp. 2.081.727.550	Rp. 1.522.592.944	73,14%
Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Rp. 240.177.550	Rp. 196.193.000	81,69%
Pemantau Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Rp. 88.004.000	Rp. 87.948.000	99,94%
Pengembangan kelembangaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Rp. 152.173.550	Rp. 108.245.000	71,13%
Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Rp. 925.353.800	Rp. 851.355.944	92%

Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Rp. 921.353.800	Rp. 847.355.944	92%
Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Rp. 4.000.000	Rp. 4.000.000	100%
Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan angka Kecukupan Gizi	Rp. 916.196.200	Rp. 851,163,500	92%
Penyusun dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Rp. 6.940.000	Rp. 5.940.000	85,59%
Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Rp. 903.437.200	Rp. 839.604.500	92,93%
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Rp. 5.819.000	Rp. 5.619.000	95,56%
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Rp. 30.389.900	Rp. 30.194.900	99,36%
Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 30.389.900	Rp. 30.194.900	99,36%
Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 8.720.000	Rp. 8.525.000	97,76%
Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 3.240.000	Rp. 3.240.000	100%
Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 3.829.900	Rp. 3.829.900	100%
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 14.600.000	Rp. 14.600.000	100%
TOTAL	Rp. 7.719.406.166	Rp. 6,754,255,414	87.50%

Sumber : Data Diolah Tahun 2022

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2022 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*). Pembuatan LKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak. LKIP Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2022 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2022 dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam Tahun Anggaran 2022 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.7.719.406.166 (Tujuh Miliar Tujuh Ratus Juta Sembilan Belas Juta Empat Ratus Enam Ribu Seratus Enam Puluh Enam Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp.6.754.255.414,- (Enam Miliar Tujuh Ratus Juta Lima Puluh Empat Dua Ratus Lima Puluh Lima Empat Ratus Empat Belas Rupiah) dengan demikian dapat dikatakan tahun 2022 realisasi anggaran mencapai 87,50%.

Untuk mewujudkan ketahanan pangan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan perlu adanya dukungan dari semua pihak. Hal ini perlu adanya koordinasi dalam perencanaan dan pengembangan penganekaragaman serta ketersediaan dan keamanan pangan yang baik di tingkat daerah dan masyarakat.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2022 ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Kandangan, Desember 2022
Kepala Dinas Ketahanan Pangan,



I. H. AKHMAD MAWARDI

Pembina Utama Muda

NIP. 19601219 198503 2 006

DOKUMENTASI KEGIATAN



1. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan



Lampiran Gambar 1.1 Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten (Beras) dititip di Bulog



Lampiran Gambar 1.2 Pengadaan Gabah di Lumbung Pangan Gapoktan Bumi Raya Desa Murung Raya Kecamatan Daha Utara pada 12 Juni 2022



Lampiran Gambar 1.3 Pemantauan stok dan harga gabah dan beras di
penggilingan sampel kabupaten



Lampiran Gambar 1.4

Pemantauan Harga Bahan Pokok di Pasar Kandangan



Lampiran Gambar 1.5
Kegiatan Gelar Pangan Murah (GPM) oleh Toko Tani Indonesia (TTI)



Lampiran Gambar 1.6 Kegiatan Gelar Pangan Murah (GPM) oleh Toko Tani Indonesia (TTI) Sebagai Penanganan Dampak Inflasi



Lampiran Gambar 1.7
Pembangunan Lumbung, Lantai Jemur dan RMU Desa Hamayung Utara





Lampiran Gambar 1.8
Peresmian Lumbung Pangan Desa Wasah Tengah

2. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan



Lampiran Gambar 1.9 Pengambilan sampel pangan segar asal tumbuhan untuk pengujian pangan segar





Lampiran Gambar 1.10
Pengujian Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan



Lampiran Gambar 1.11
Kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L) Tahun 2022



3. Bidang Sekretariat



Lampiran Gambar 1.12
Mengikuti Kegiatan Expo Hari Jadi Kabupaten HSS



Lampiran Gambar 1.13
Mengikuti Kegiatan Syukuran Hari Jadi Kabupaten HSS

